

**BANTENG BERKALUNG BINTANG:
ALIANSI MEGA BINTANG DARI POLITIK KE YAYASAN SOSIAL
(TAHUN 1997-2013) DI SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa
Universitas Islam Negeri Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Menyusun Skripsi



Oleh:

Crypton Umaro 'Amri
NIM. 163231051

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2022

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Crypton Umara' Amri
NIM : 163231051

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa
Di UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing memutuskan bahwa skripsi saudara:

Nama : Crypton Umara' Amri
NIM : 163231051

Judul : Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sukoharjo, 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.
NIP. 197004101997031004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta** yang disusun oleh **Crypton Umaro' Amri** telah di pertahankan di depan Dewan penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji Utama : Latif Kusairi, M.A
NIP. 198410252018011000

()

Penguji I,
Merangkap Ketua : Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd., M.A.
NIP. 198804302018012001


()

Penguji II,
Merangkap Sekretaris
(Pembimbing) : Dr.H. Moh.Mahbub, S.Ag., M.Si.
NIP. 197004101997031004

()

Sukoharjo, 14 Desember 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Bahasa

UNIVERSITAS NEGERI
RADEN MAS SAID


Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag
NIP. 197104031998031005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua Orangtua saya

Bapak Suripno dan Ibu Sumarmi

Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam

Bapak Latif Kusairi, M.A

Dosen Pembimbing Skripsi

Bapak Dr.H.Moh.Mahbub, S.Ag., M.Si

Dosen-dosen yang banyak membantu

Ryas Basmala

Teman-teman seperjuangan

Teman-teman SPI angkatan 2016

Almamaterku UIN Raden Mas Said Surakarta

Semua orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

-Ali bin Abi Thalib-

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa ”

-Ridwan Kamil-

“Engkau adalah Tamu terhormat, jangan menangis seperti pengemis untuk potongan Dunia”

-Jalaluddin Rumi-

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Crypton Umaro' Amri

NIM : 163231051

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Fakultas Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta*" adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari diketahui skripsi ini adalah plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Sukoharjo, 12 Desember 2022

Yang menyatakan



Crypton Umaro' Amri

NIM. 163231051

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “BANTENG BERKALUNG BINTANG: ALIANSI MEGA BINTANG DARI POLITIK KE YAYASAN SOSIAL TAHUN 1997-2013 DI SURAKARTA”. Serta tidak lupa shalawat dan salam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri taulada bagi kita semua.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana dari Program Studi Sejarah peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa. Penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan di dalamnya banyak ditemui hambatan namun berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini mampu terselesaikan.

Dengan segala kerendahan, keikhlasan dan ketulusan hati, banyak pihak yang harus dihargai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Mudofir, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Adab dan Bahasa
3. Bapak Latif Kusairi, M.A selaku Ketua Jurusan Studi Sejarah Peradaban Islam yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan agar skripsi ini selesai dengan baik.

5. Seluruh staff pengajar jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta, berkat pengajaran dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Monumen Pers Surakarta dan Yayasan Mega Bintang yang memberikan izin penulisan untuk melakukan penelitian serta mencari sumber-sumber untuk penulisan skripsi.
7. Bapak dan ibu tercinta Bapak Suripno dan Ibu Sumarmi yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan secara material dan non material agar skripsi ini selesai dengan baik
8. Kepada istriku Ryas Basmala yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Sejarah Peradaban Islam Angkatan 2016 yang telah menemani penulis selama ini dalam berproses di kampus dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Kepada warga Kartodipuran dan narasumber yang bersedia untuk penulis wawancara

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D.Ruang Lingkup Penelitian	10
E.Manfaat Penelitian	11
F.Tinjauan Pustaka.....	12
G.Kerangka Konsep	15
H.Metode Penelitian.....	19
I.Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
PARTAI DEMOKRASI DI ERA ORDE BARU	24
A. Konflik PDI dan Terpecahnya Menjadi Dua Kubu di Era Orde Baru	24

B. Peristiwa Kudatulis 27 Juli 1996.....	27
1. Tanggapan Pemerintah terhadap Peristiwa 27 Juli 1996	31
2. Tanggapan Organisasi Islam terhadap Peristiwa 27 Juli 1996.....	32
3. Tanggapan Komnas HAM terhadap Peristiwa 27 Juli 1996	33
C. Pemilu Tiga Partai (Golkar, PDI, dan PPP): Pengaruh Kebijakan Baru Terhadap Perjalan PPP	34
BAB III.....	39
DINAMIKA ALIANSI MEGA BINTANG DI ERA ORDE BARU (1997)...39	
A. Terbentuknya Aliansi Mega Bintang	39
B. Dinamika Aliansi Mega Bintang di Era Orde Baru 1997	42
C. Perkembangan Suara Partai Persatuan Pembangunan	45
D. Sikap Mega Bintang terhadap Perpolitikan di Era Orde Baru 1997	49
BAB IV	53
PENGARUH ALIANSI MEGA BINTANG DI DALAM BIDANG SOSIAL DAN POLITIK.....	53
A. Kegiatan Politik	53
B. Kegiatan Sosial	55
C. Respon Masyarakat	75
BAB V	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial tahun 1997-2013 di Surakarta”. Fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut, (1) Aliansi Mega Bintang Bagi PPP dalam menghadapi pemilu 1997, (2) Dinamika Aliansi Mega Bintang di Era Orde Baru, (3) Pengaruh Aliansi Mega Bintang di Bidang Sosial, Politik dan Hukum. Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya aliansi Mega Bintang yakni pada tahun 1997-2013, menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh aliansi Mega Bintang pada bidang sosial, politik dan hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, meliputi heuristik yaitu proses mencari data, kritik atau menyeleksi sumber sejarah, interpretasi yang merupakan penafsiran data-data yang diperoleh dan historiografi atau proses penulisan. Dalam penelitian skripsi ini, penulisan mengumpulkan, menyaring informasi lalu menyusun data melalui penelitian perpustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, koran, artikel, situs web serta wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Monumen Pers kota Surakarta dan Yayasan Mega Bintang di Surakarta dapat disimpulkan bahwa, (1) Aliansi terbentuk dikarenakan ketidakadilan penguasa, (2) Aliansi Mega Bintang memberikan suara dan dukungan bagi PPP, (3) Mega Bintang tidak hanya memberikan perannya untuk bidang politik, namun juga dalam bidang sosial dan hukum yakni dengan membuat Yayasan Mega Bintang.

Kata Kunci: *Dinamika, Aliansi, Mega Bintang*

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GOLKAR	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
OPP	: Organisasi Peserta Pemilu
ORBA	: Orde Baru
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang – Undang

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	18
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	25
Gambar 2.2	26
Gambar 2.3	28
Gambar 2.4	29
Gambar 2.5	30
Gambar 2.6	31
Gambar 2.7	32
Gambar 2.8	34
Gambar 3.1	41
Gambar 3.2	44
Gambar 3.3	46
Gambar 3.4	47
Gambar 3.5	50
Gambar 3.6	51
Gambar 3.7	52
Gambar 4.1	57
Gambar 4.2	59
Gambar 4.3	61
Gambar 4.4	62

Gambar 4.5.....	64
Gambar 4.6.....	66
Gambar 4.7.....	67
Gambar 4.8.....	69
Gambar 4.9.....	71
Gambar 4.10.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	36
Tabel 3.1	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah tidak asing lagi dengan Partai Politik bersimbol Banteng dan berwarna merah yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga Partai bersimbol Ka'bah di mana organisasi-organisasi besar saat ini seperti NU pernah bergabung di dalamnya yaitu PPP. PDI merupakan partai yang terbentuk pada tahun 1973 dan merupakan gabungan dari beberapa partai. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katholik. Gabungan dari partai-partai tersebut kemudian pada tanggal 10 Januari 1973 dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI ini sejak terbentuk sudah sering mengalami konflik internal dan adanya intervensi dari pemerintah.¹PPP sendiri adalah partai yang merupakan fusi dari partai-partai Islam yaitu NU, Parmusi, SI, dan Perti pada tahun 1973. Organisasi-organisasi Islam ini pernah melebur dalam tubuh PPP sebagai partai politik pusat kekuatan politik Islam.² PPP merupakan partai yang mengikuti pemilu sepanjang masa Orde Baru. Akan tetapi PPP ini selalu mendapatkan suara dan kursi yang

¹Maghita Primastya, Sejarah PDI Perjuangan, Didirikan Oleh IR Soekarno Tahun 1927 dengan Nama Awal PNI, *Tribunnews.com*, dipublikasikan tanggal 7 Agustus 2019, diakses tanggal 12 April 2021.

²Tian Fitriana Huda, "Dinamika Partai Persatuan Pembangunan Pada Era Orde Baru", *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember*, (2012). Hlm. Viii.

lebih sedikit dibandingkan dengan Golkar yang sepanjang pemilu Orde Baru di bawah rezim Soeharto selalu mendapatkan suara dan kursi terbanyak.³

PDI pada masa Orde Baru sering kali mengalami gejolak dan persengketaan. PDI juga pernah mengalami perpecahan di dalam tubuh PDI sendiri, hal ini tidak lain karena terpilihnya Megawati sebagai ketua umum dan ketidaksetujuan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. PDI sempat terpecah dalam dua kubu sejak adanya Kongres di Medan tahun 1993. Kemudian semakin terpecah sejak Kongres Luar Biasa PDI yang digelar di Surabaya pada bulan Desember 1993 ketika Megawati terpilih sebagai ketua umum. Popularitas Megawati Soekarno Putri mencitukan nyali Presiden Soeharto. Akhirnya rezim memainkan peran Soerjadi yang akhirnya terpilih dalam Kongres di Medan tahun 1996.⁴ PDI semakin bergejolak sejak adanya peristiwa kudatuli, yaitu peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro. PDI terbagi menjadi dua kubu yaitu PDI Soerjadi dan PDI Pro Mega. Pada akhirnya Megawati tidak mendapatkan posisi apapun.⁵ Peristiwa Kudatuli ini terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diserbu merupakan kantor yang dikuasai Megawati Soekarno Putri. Banyak korban yang tewas dan

³Noviah Iffatun Nisa, dkk, "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1977, *Jurnal History*, Vol. 1 No. 1, (2017). Hlm. 146-148.

⁴Budiarti Utami Putri, Kisah PDI: Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP, *Tempo.co*, terbit tanggal 10 April 2017, diakses tanggal 12 April 2021.

⁵Wawancara Yanis Budhi Rochmawati dengan Indra Mardiani (saksi sejarah), dalam skripsi Yanis Budhi Rochmawati, ""Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004", *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, (2011). Hlm. 88.

luka-luka dalam penyerbuan tersebut. Peristiwa tersebut banyak dilakukan oleh para petinggi militer.⁶

Pemilu tahun 1997 membuat Megawati tidak dapat ikut sebagai peserta dalam pemilu karena tidak boleh ada partai dengan simbol ganda. PDI Pro Mega kemudian membuat partai sendiri menjadi PDI Perjuangan.⁷ Megawati dalam pesan hariannya menyatakan bahwa segenap pendukung PDI Megawati di seluruh penjuru Tanah Air tidak akan mengikuti kampanye pemilu tahun 1997. Langkah PDI Pro Megawati ini diambil untuk menghindari kekerasan karena adanya provokasi dari pihak tertentu.⁸ Akan tetapi, Megawati sendiri tetap memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pemilu 1997.⁹

Sebelum adanya Mega Bintang, perolehan suara PPP dan PDI selalu kalah dari suara Golongan Karya. Pada pemilu tahun 1971 Golkar meraih suara 227 kursi (62,80%), sedangkan PPP hanya memperoleh 27,11%. Pemilu tahun 1977 Golkar memperoleh suara 62,11% sedangkan PPP lebih sedikit yaitu 29,29%. Pemilu tahun 1982 Golkar berhasil merebut 10 kursi, sedangkan PPP dan PDI kehilangan 10 kursi untuk DPR. Golkar memperoleh 242 kursi (64,34%) sedangkan PPP memperoleh 94 kursi (27,78%), dan PDI hanya memperoleh 24 kursi (7,88%). Pemilu tahun 1987 Golkar memperoleh tambahan 57 kursi DPR, PDI juga memperoleh kursi tambahan menjadi 40 kursi

⁶Agn, "PRD Minta Ungkap Kasus PRD", *Koran Kompas*, terbit tanggal 19 Juli 2004. Hlm. 003.

⁷*Loc.cit*, Yanis Budhi Rochmawati.

⁸JL, "PDI Pro-Mega Tak Akan Ikut Kampanye", *Koran Kompas*, terbit 24 April 1997. Hlm. 14.

⁹Ipung S Azhar, "Aliansi Mega-Bintang, Perolehan Suara OPP, dan Kekerasan Politik, *Koran Kompas*, terbit 28 Mei 1997.

sedangkan PPP kehilangan 33 kursi. Pemilu tahun 1992 Golkar memperoleh suara 68,10% perolehan kursi di DPR 282 kursi, PPP memperoleh tambahan 1 kursi sehingga menjadi 62 kursi, PDI juga mendapatkan tambahan 16 kursi. Pada pemilu tahun 1997 Golkar menunjukkan suara yang begitu melambung yaitu 74,51% dan merupakan jumlah paling tinggi sepanjang pemilu masa Orde Baru, dan jumlah kursi dari Golkar adalah 325 kursi. PPP sebenarnya juga mengalami kenaikan akan tetapi tetap dimenangkan oleh Golkar. PDI sendiri mengalami keterpurukan karena terjadi konflik internal di tubuh PDI.¹⁰

Menjelang kampanye pemilu Mei 1997 PPP mengajak PDI Mega untuk bergabung pada PPP daripada bergabung dengan PDI Soerjadi. Pada saat kampanye pemilu 1997 muncul gerakan Aliansi Mega Bintang untuk melawan hegemoni Golkar dan Rezim Soeharto.¹¹ Aliansi Mega Bintang disebut muncul setelah adanya pertemuan antara Megawati dengan Ketua DPC PPP Surakarta, Mudrick Sangidoe. Kombinasi warna merah (PDI) dan hijau (PPP), gambar Megawati atau Buya Ismail dijadikan sebagai atribut kampanye.¹² Kata Mega-Bintang, Mega mengacu pada Megawati Soekarno Putri dan Bintang mengacu pada lambang PPP. Aliansi Mega Bintang atau pendukung Megawati terjadi di berbagai tempat. Para pendukung Megawati menyatakan diri bergabung dengan PPP.¹³

¹⁰Noviah Iffatun Nisa, dkk, "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1977, *Jurnal Historya*, Vol. 1 No. 1, (2017). Hlm. 146-148.

¹¹Fadrik Aziz Firdausi, Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Tirto.id*, dipublikasikan pada 3 Februari 2019, diakses pada 12 April 2021.

¹²*Kompas*, "Pasca-27 Juli 1996: Fenomena Mega Bintang dan Megawati yang Memilih Golput", *Kompas.com*, terbit tanggal 29 Juli 2020.

¹³Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Loc.cit*.

Pemilu tahun 1997 diikuti oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Menjelang pemilu tahun 1997 menunjukkan adanya aksi pengecatan warna kuning mulai dari batang pohon, trotoar jalan, hingga instansi-instansi gedung pemerintahan. Hal ini mendapat protes dari dua partai yang bercorak nasionalis yaitu PDI, dan partai yang bercorak Islam yaitu PPP. Hal ini dianggap sebagai bentuk kampanye terselebung terhadap OPP tertentu yaitu Golongan Karya. Golongan Karya selalu mendapat dukungan dari aparat sipil dan militer dan berhasil menang di setiap pemilu dari tahun 1977 sampai 1997. Soeharto juga selalu mengatakan bahwa jangan pernah menonjolkan agama dalam partai politik. Jangan pula menyebut-nyebut nama Islam dalam partai politik. Oleh karena itu disebutlah Partai Persatuan Pembangunan dengan program spiritual-materil.¹⁴ Di samping hal tersebut dan dengan adanya konflik internal di tubuh PDI yaitu Pro Mega dan Pro Soerjadi, maka PDI Pro Mega yang bercorak nasionalis akhirnya membentuk koalisi dengan partai Islam yaitu PPP melalui konsep “Mega Bintang” pada 27 April 1997 di Solo.¹⁵ Jadi partai nasionalis PDI Pro Mega dengan PPP yang bercorak Islam ini beraliansi dengan tujuan melawan hegemoni rezim Soeharto dan Golkar.¹⁶

Adanya Mega Bintang pun sangat menguntungkan bagi PPP, di Ibu Kota, kampanye Partai Persatuan Pembangunan mendapat sambutan yang

¹⁴Ramadhian Fadillah, Ini Penyebab Cuma Boleh Ada 3 Partai Politik di Era Soeharto, *Merdeka.com*, dipublikasikan pada 15 Oktober 2019, diakses pada 28 April 2021. Tersedia: <https://m.merdeka.com/politik/penyebab-cuma-boleh-ada-3-partai-politik-di-era-soeharto.html?page=2>.

¹⁵*Ibid.* Hlm. 78-79.

¹⁶Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru. *Loc.cit.*

sangat luar biasa dari masyarakat di Jakarta. Kampanye yang diadakan di Jakarta ini juga dimeriahkan oleh atribut-atribut yang bernuansa PDI Pro Mega. Spanduk dan poster yang mengisyaratkan koalisi Mega Bintang juga semarak kampanye dan maraknya pendukung PPP terjadi di berbagai tempat, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tangerang.¹⁷ Di Tegal sekitar 7000an pendukung Megawati menyatakan untuk bergabung dengan PPP. Di Samarinda, ribuan warga pendukung Mega membaaur dengan kerumunan massa Partai Ka'bah atau PPP.¹⁸ PPP semenjak beraliansi dan membentuk Mega Bintang selama masa pemilu 1997 berhasil mengumpulkan massa relatif banyak. Berkat dukungan Mega Bintang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih kesuksesan, khususnya di wilayah Surakarta.¹⁹

PDI adalah partai yang memiliki sejarah politik nasionalisme dan personifikasi politik Soekarno. Ide dasar PDIP ada dua, yaitu pertama nasionalis yang mengikuti dari ide Bung Karno. PDIP untuk semua yaitu tidak boleh untuk satu etnis, suku, ataupun agama. Dalam AD/ART PDIP ideologi PDIP adalah Pancasila, yaitu Pancasila yang menjadi pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Kedua, ekonomi kerakyatan. PDIP ingin kesejahteraan sosial dalam Pancasila yaitu keadilan sosial. Hal ini merupakan idenasionalisme Bung Karno yaitu

¹⁷*Kompas*, "PPP di Ibu Kota, Luar Biasa Makin Tampak, Fenomena "Mega-Bintang"", Koran Kompas, terbit 12 Mei 1997.

¹⁸Fadrik Aziz Firdausi, Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Tirto.id*, dipublikasikan pada 3 Februari 2019, diakses pada 12 April 2021.

¹⁹TOV/ASA, "PPP Solo Realisasikan Kegiatan Mega Bintang", *Koran Kompas*, terbit tanggal 3 Oktober 1997. Hlm. 14.

nasionalisme dan ekonomi.²⁰ Meski PDIP ini merupakan partai yang nasionalis, pada masa Orde Baru pada akhirnya bisa bergabung dengan partai yang coraknya Islam yaitu PPP. Pada masa Orde Baru kedua partai ini memiliki permasalahan yang sama. Adanya Undang-Undang No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar yang memuat tentang peraturan dilaksanakannya *floating mass* dan melarang menggunakan tempat ibadah sebagai arena politik, menjadikan kelemahan kekuatan bagi PPP yang berbasis pada umat Islam. Pemuka-pemuka masyarakat di tingkat desa dan kecamatan hampir semua mendukung Golkar.²¹

Respon pemerintah Orde Baru sendiri terhadap Aliansi Mega Bintang, pemerintah melarang adanya simbol-simbol dan spanduk-spanduk Mega Bintang. Pemerintah juga melarang adanya spanduk Mega Bintang dalam pemilu PPP karena dianggap menyalahi peraturan tentang kampanye pemilu. Pihak PPP juga mempertanyakan peraturan mana yang melarang adanya simbol Mega Bintang.²²

Kerusuhan-kerusuhan dalam perpolitikan masih berlanjut sampai tahun 1998. Pada tahun 1998 di Solo terjadi kerusuhan pada tanggal 14-15 Mei 1998. Sebelumnya kerusuhan juga terjadi di Jakarta. Sempat beredar bahwa kelompok PPP maupun Mega Bintang adalah penggerak dari kerusuhan tersebut. Ketua

²⁰Galang Gerald, "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS, *Jurnal Politicon*, Vol. 1 No. 2, (2019). Hlm. 140-141.

²¹Zain Nur Rusidi, "Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987-2004", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, (2007). Hlm. 77.

²²*Kompas*, "Soal Pelarangan "Mega Bintang" dan Dokumen "Operasi Fajar": Kecemburuan pada PPP", *Koran Kompas*, terbit tanggal 14 Mei 1997. Hlm. 001.

DPC PPP Solo, Mudrick Setiawan M Sangidoe membantah tuduhan tersebut. Mudrick menyatakan bahwa ABRI sendiri tidak berusaha mengatasi kerusuhan tersebut. Dari pihak ABRI sendiri juga menegaskan bahwa tuduhan ABRI tidak sungguh-sungguh berusaha mengatasi kerusuhan di Solo itu tidak benar.²³

Pemilu tahun 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru karena rezim Soeharto harus runtuh tahun 1998. Berbeda pada masa Reformasi, di mana PDI Pro Megawati atau PDIP menang dalam pemilu dengan hasil suara 35,7 juta (33,12 persen) pada tahun 1999. Di era reformasi Megawati Soekarno Putri memiliki popularitas yang sangat menggelembung.²⁴ Penelitian ini menjadi menarik, karena PDI Perjuangan yang bersimbol Banteng yang masih eksis sampai sekarang, ternyata memiliki dinamika sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia yaitu masa Orde Baru. Di mana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ini pernah pecah menjadi dua kubu yaitu pendukung Soerjadi dan PDI Pro Megawati. Hingga pada akhirnya terbentuklah Aliansi Mega Bintang di tahun 1997. Begitu pula dengan PPP, di mana partai yang merupakan fusi dari organisasi-organisasi dan partai Islam ini pernah melakukan koalisi atau aliansi dengan partai yang bercorak nasionalis yaitu PDI.

Kekuasaan Mega Bintang tidak hanya dalam bidang politik saja, namun mereka mengepakan sayapnya dan menarik simpatisan masyarakat dengan terjun dalam kegiatan sosial. Mega Bintang membuat yayasan pada tahun 1998,

²³Asa, dkk, "Amien Rais: Kerusuhan Jakarta dan Solo Ada Dalangnya", *Koran Kompas*, terbit 11 Juni 1998. Hlm. 1.

²⁴Moh. Samsul Arifin, "Faktor Megawati", *Liputan6*, dipublikasikan tanggal 28 Januari 2009, diakses tanggal 15 April 2021.

dan lembaga bantuan hukum di tahun 2004 dengan tetap pada jargonnya yakni “Bolone Wong Cilik”. Asas kemanusiaan dan ketidakadilan tetap menjadi acuan bagi Mega Bintang ini sendiri untuk selalu membantu dengan sukarela bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian yang berjudul **Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta**. Alasan penulis mengambil tonggak tahun tersebut di mana tahun 1997 adalah tahun munculnya Aliansi Mega Bintang, dan berakhir tahun 2013 dikarenakan pada tahun tersebut Mega Bintang sudah menjadi lembaga yang tercatat di Kemenkumham.

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul **Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta** berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas amaka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aliansi Mega Bintang bagi PPP dalam menghadapi pemilu 1997?
2. Bagaimana Dinamika Aliansi Mega Bintang di Era Orde Baru?
3. Bagaimana Pengaruh Aliansi Mega Bintang di bidang Sosial, Politik dan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara terinci adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konflik awal yang terjadi pada PDI yang terpecah menjadi dua kubu Pro Mega dan Pro Soerjadi.
2. Mengetahui Munculnya atau Sejarah lahirnya Aliansi Mega Bintang dalam Perpolitikan Masa Orde Baru tahun 1997 dan pengaruhnya bagi PPP.
3. Mengetahui dan menguraikan Pengaruh Aliansi Mega Bintang Pada bidang Sosial, Politik, dan Hukum

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar menjadi penelitian yang kronologis, maka penelitian ini menggunakan batasan waktu tahun 1997-2013. Tahun 1997 merupakan tahun terbentuknya Aliansi Mega Bintang.²⁵ Pada tahun 1997 PDI Pro Mega bergabung dengan PPP, di mana Mega adalah pendukung Mega dan Bintang adalah lambang PPP.²⁶ Penelitian ini berhenti pada tahun 2013, dikarenakan pada tahun ini Mega Bintang sudah menjadi lembaga yang tercatat di Kemenkumham.²⁷

Setting tempat dalam penelitian ini tidak terbatas pada wilayah tertentu. Setting tempat pada penelitian ini adalah di kancah Indonesia secara umum yang berhubungan dengan Aliansi Mega Bintang. Karena kelompok Mega Bintang

²⁵*Kompas*, "Pasca-27 Juli 1996: Fenomena Mega Bintang dan Megawati yang Memilih Golput", *Kompas.com*, terbit tanggal 29 Juli 2020.

²⁶TOV/ASA, "PPP Solo Realisasikan Kegiatan Mega Bintang", *Koran Kompas*, terbit tanggal 3 Oktober 1997. Hlm. 14.

²⁷Moh. Samsul Arifin, "Faktor Megawati", *Liputan6*, dipublikasikan tanggal 28 Januari 2009, diakses tanggal 15 April 2021.

terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian mengerucut di daerah Surakarta tempat berdirinya Yayasan Mega Bintang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang judul **Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta**, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah sumber pengetahuan mengenai Dinamika Aliansi Mega Bintang.
- b. Sumber informasi untuk dikembangkan dalam penelitian yang akan datang.
- c. Memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya tulisan kesejarahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Syarat 1 di Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), Universitas Negeri Surakarta (UIN Surakarta).
- b. Manfaat bagi penulis menuangkan tulisan dan mengetahui lebih jauh tentang perjalanan PDI dan PPP serta terbentuknya Aliansi Mega Bintang.
- c. Manfaat akademisi, untuk menambah tulisan dalam kesejarahan dan menambah khasanah ilmu.

- d. Bagi masyarakat, memberi uraian agar diketahui tentang dinamika dari PDI dan PPP yang pernah membentuk Aliansi Mega Bintang.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian serupa atau terkait mengenai Aliansi Mega Bintang telah diteliti oleh peneliti lain, akan tetapi penelitian Aliansi Mega Bintang ini masih sangat jarang dituliskan. Oleh karena itu untuk menunjukkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu penulis merujuk beberapa penelitian yang sudah ada sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Hadi Mustafa (2011) jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarno Putri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”. Penelitian ini membahas mengenai biografi dan potret kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dalam PDIP. Meski Aliansi Mega Bintang ini berhubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tetapi tulisan Hadi Mustafa ini tidak terfokus pada Aliansi Mega Bintang tetapi lebih terfokus pada sosok Megawati Soekarno Putri, oleh karena itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objeknya bahwa penulis terfokus pada Aliansi Mega Bintang.²⁸

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Yanis Budhi Rochmawati (2011) Universitas Sebelas Maret, dalam skripsinya yang berjudul “Perkembangan

²⁸Hadi Mustafa, “Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarno Putri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, *Skripsi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2011).

Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004”. Penelitian ini membahas mengenai dinamika PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar mulai dari lahirnya, perkembangan, dan kekalahan PDIP di Kabupaten Karanganyar tahun 1999-2004 termasuk Mega Bintang di Karanganyar. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini, penulis mengkaji Aliansi Mega Bintang yang berhubungan dengan PDIP tahun 1997-2013 secara umum di Indonesia dan mengerucut di Surakarta.²⁹

Ketiga, penelitian yang ditulis Tian Fitriana Huda (2012) jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember, dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Partai Persatuan Pembangunan Pada Era Orde Baru”. Penelitian ini membahas mengenai dinamika dari PPP dari tahun 1973-1997 dari masa berasas Islam sampai dengan berasas Pancasila. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, di mana PPP adalah partai yang membentuk Mega Bintang pada era Orde Baru dan memberikan pengaruh bagi PPP. Akan tetapi dalam penelitian tersebut belum dijelaskan. Oleh karena itu penulis akan mengembangkan dan menjelaskan mengenai pengaruh Mega Bintang bagi PPP.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Vicky Verry Angga (2015) jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret, dalam skripsinya yang berjudul “Aktivitas Politik Partai Rakyat Demokratik Melalui Gerakan Mega Bintang Rakyat di Jakarta Tahun 1997”. Penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan Mega Bintang pada Partai Demokratik yang ada di Jakarta pada

²⁹Yanis Budhi Rochmawati, ” “Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004”, *Skripsi Universitas SebelasMaret*,(2011).

tahun 1997. Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini, penulis membahas mengenai Mega Bintang secara umum kemudian mengerucut di Surakarta. Penulis juga menulis penelitian ini secara kronologis yaitu tahun 1997 sampai tahun 2013.³⁰

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Uldan Tajri (2016) jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Pergulatan PDI Perjuangan sebagai Partai Ideologis di Indonesia (Studi Diskriptif Kualitatif Tentang Pergulatan PDI Perjuangan dari Pragmatis ke 1 Juni)”. Penelitian ini membahas mengenai pergulatan yang dialami PDI Perjuangan sampai dengan kekalahan PDI Perjuangan dan sikap oposisinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis mengkaji mengenai peristiwa-peristiwa dari PDI dan partai politik yang menimbulkan adanya Aliansi Mega Bintang.³¹

³⁰ Vicky Verry Angga, “Aktivitas Politik Partai Rakyat Demokratik Melalui Gerakan Mega Bintang Rakyat di Jakarta Tahun 1997”, *Skripsi Ilmu Sejarah Universitas SebelasMaret*, (2015).

Penelitian yang membahas mengenai PDI Perjuangan sudah beberapa kali ditulis, tetapi yang berkaitan dengan Aliansi Mega Bintang masih sangat jarang dituliskan. Oleh karena itu melihat penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, penulis mencoba mencari sisi lain yang belum dituliskan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Berangkat dari latar belakang ini penulis mengambil penelitian yang berjudul “Banteng Berkalung Bintang: Aliansi Mega Bintang Dari Politik ke Yayasan Sosial Tahun 1997-2013 di Surakarta”.

G. Kerangka Konsep

1. Teori Organisasi

Penulis menggunakan teori Holloway (1997) yang menyebutkan bahwa konsep Ormas atau LSM merupakan bentuk organisasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang secara mandiri bukan untuk mencari keuntungan, atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, Holloway juga menyebutkan bahwa organisasi masyarakat ini mematuhi aturan undang-undang serta tercatat sebagai organisasi untuk pengenalan sosial dan menerima prinsip tanggungjawab sosial.

Pesatnya pertumbuhan LSM dan berbagai bentuk organisasi lain non pemerintah didukung oleh jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi dan politik berkepanjangan. Tumbangannya kekuasaan Soeharto yang totaliter kemudian diikuti dengan bangkitnya era

³¹Uldan Tajri, “Pergulatan PDI Perjuangan sebagai Partai Ideologis di Indonesia (Studi Diskriptif Kualitatif Tentang Pergulatan PDI Perjuangan dari Pragmatisme 1 Juni)”, *Skripsi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta*, (2016)

baru, yakni transisi menuju demokrasi. Era tersebut yang membawa perubahan-perubahan penting terhadap tatanan kehidupan sosial-politik yang salah satunya berdampak pada tumbuhnya LSM dan juga organisasi-organisasi lain.

Menurut Budi Setiyono, LSM merupakan Lembaga atau organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai fungsi signifikan dalam proses demokratisasi.³²

Dengan adanya teori dari Holloway, maka skripsi ini berhungungan. Dikarenakan pada penelitian skripsi ini, penulis juga membahas mengenai Yayasan Mega Bintang yang pada awalnya berkecimpung di dunia politik lalu berpindah dalam kegiatan sosial.

2. Teori Perubahan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, mustahil jika ia bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain atau berhubungan dengan yang lain. Tentu berhubungan dengan orang lain tak semudah yang dibayangkan karena setiap manusia mempunyai watak dan karakter yang berbeda-beda yang belum tentu bisa diterima oleh manusia lain.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Wilbert More mengartikan perubahan sosial sebagai suatu

³² Budi Setiyono. "Pengawasan Pemilu oleh LSM". Suara Merdeka, 15 Oktober 2003.

perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan system interaksi sosial, termasuk di dalamnya erubahan norma, nilai, dan fenomena kultural.

William Ogburn, menjelaskan pengertian perubahan sosial dengan membuat batasan ruang lingkup perubahan tersebut. Ogburn menjelaskan bahwa perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial dengan penekanan yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur kebudayaan yang immaterial.

Perubahaan sosial ini menjadi landasan kerangka konsep bagi penulis karena saling berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Mega Bintang yang awalnya bergerak di bidang sosial kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dengan adanya interaksi antar manusia sehingga mengalami perubahan menjadi sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial.

3. PDI Masa Orde Baru

PDI mengalami perpecahan pada masa Orde Baru di mana PDI terpecah ke dalam dua kubu yaitu PDI Soerjadi dan PDI Pro Mega.³³ Perpecahan semakin rumit dan menyangkut HAM sejak adanya peristiwa Kudatuli atau peristiwa 27 Juli 1997. Kelompok militer yang melakukan kerusuhan di

³³Wawancara Yanis Budhi Rochmawati dengan Indra Mardiani (saksi sejarah), dalam skripsi Yanis Budhi Rochmawati, "Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004", *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, (2011). Hlm. 88.

kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta. Kantor ini merupakan kantor dari pusat PDI Megawati Soekarno Putri.³⁴

4. Aliansi Mega Bintang

Aliansi Mega Bintang muncul tahun 1997 untuk melawan hegemoni rezim Soeharto dan Golkar.³⁵ PDI Pro Mega bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dan dikenal dengan Aliansi Mega Bintang.³⁶ Mega menunjukkan sebagai pendukung Megawati dan Bintang adalah lambang dari PPP. Simbol gabungan dari PDI Mega dengan PPP digunakan dalam kampanye baik dalam spanduk-spanduk maupun poster-poster.³⁷

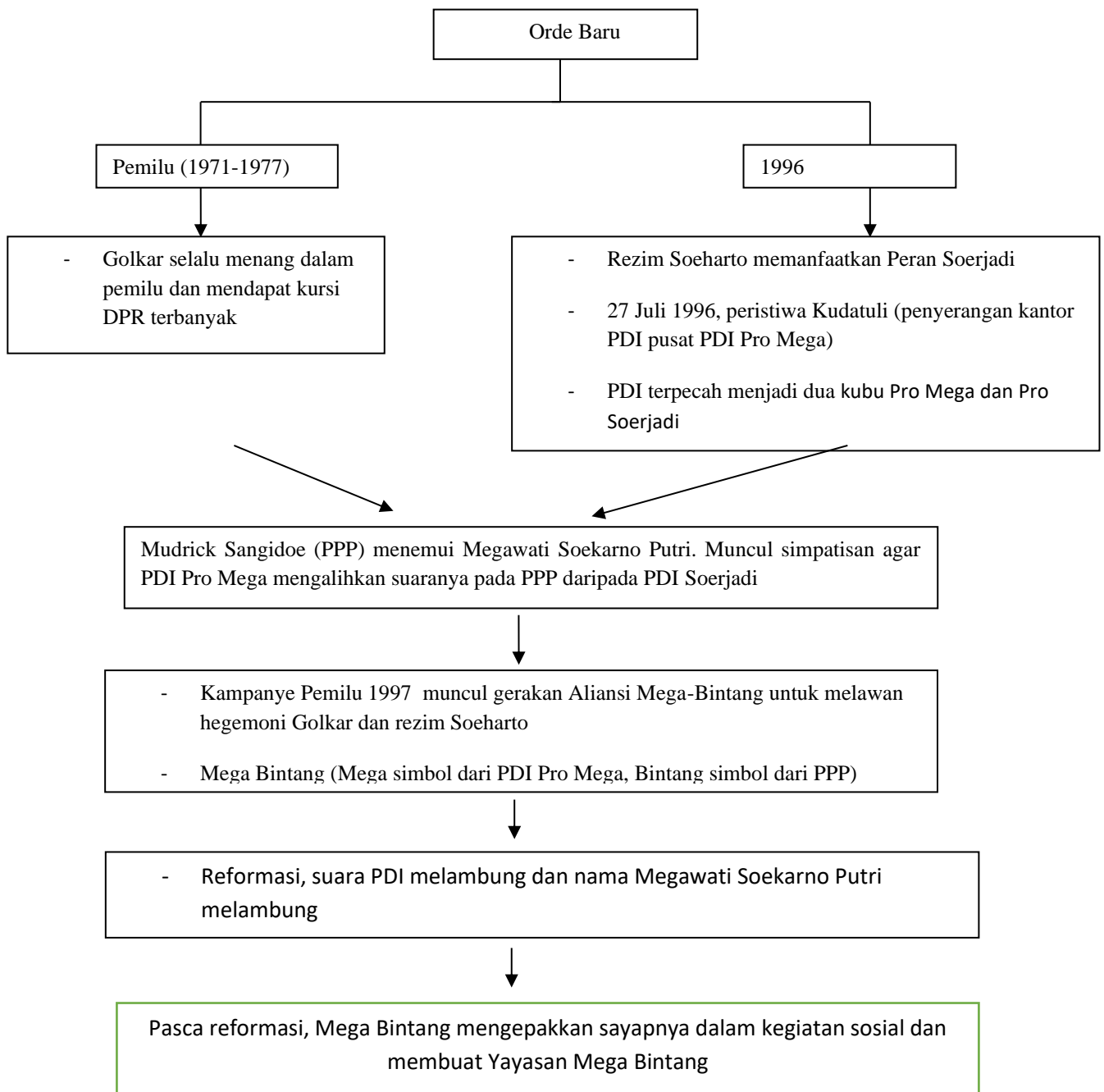
³⁴Agn, "PRD Minta Ungkap Kasus PRD", *Koran Kompas*, terbit tanggal 19 Juli 2004. Hlm. 003.

³⁵Fadrik Aziz Firdausi, Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Tirto.id*, dipublikasikan pada 3 Februari 2019, diakses pada 12 April 2021.

³⁶TOV/ASA, "PPP Solo Realisasikan Kegiatan Mega Bintang", *Koran Kompas*, terbit tanggal 3 Oktober 1997. Hlm. 14.

³⁷Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Loc.cit.*

Bagan 1.1. terbentuknya Aliansi Mega Bintang



H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis atau metode sejarah, dengan urutan metode sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Tahap paling awal sebelum menuju tahapan metode sejarah adalah pemilihan topik. Dalam pemilihan topik ini penulis memilih topik yang masih jarang ditulis oleh orang lain atau penelitian terdahulu. Penulis juga memilih topik berdasarkan penemuan data-data yang penulis peroleh.

2. Heuristik

Heuristik merupakan pencarian data-data atau sumber-sumber keterangan sebagai suatu bukti sejarah. Heuristik ini merupakan tahapan awal dalam penulisan sejarah.³⁸ Dalam tahap ini penulis mengumpulkan sumber baik primer maupun sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer di sini penulis menggunakan data-data koran dan wawancara dengan Narasumber yang ditulis sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sumber-sumber primer ini ditulis pada tahun 1997 sampai tahun 2013. Penulis menggunakan data-data sezaman yang menjelaskan mengenai permasalahan politik khususnya partai politik PDIP tahun 1997 sampai 2013.

³⁸Wasino & Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penelitian*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018). Hlm. 18.

b. Sumber sekunder

Penulis juga menggunakan sumber sekunder sebagai sumber pendukung dalam penelitian penulis. Penulis menggunakan data-data seperti skripsi, tesis, jurnal, website resmi, dan juga koran-koran yang ditulis masa sekarang. Penulis menghindari penggunaan sumber-sumber yang berupa blogspot atau website perseorangan.

3. Kritik

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber ini merupakan tahap menilai dan menguji data-data sumber dengan kritik luar atau *ekstern* dan kritik dalam atau *intern*. Tahap ini bertujuan untuk menentukan otentisitas sumber, kebenaran sumber sebelum digunakan dalam penelitian.³⁹ Dalam tahap ini penulis melakukan kritik sumber seperti kapan terbitnya sumber, ditulis oleh siapa dan dari pihak mana. Penulis juga membandingkan sumber-sumber sekunder yang penulis dapat dengan sumber-sumber primer yang penulis dapat.

4. Intepretasi

Intepretasi merupakan tahapan penafsiran. Karena tanpa penafsiran dari seorang penulis sejarah, data tidak dapat berbicara. Intepretasi ini dibagi menjadi dua yaitu analisi dan sintesis.⁴⁰

³⁹*Ibid.* Hlm. 12.

⁴⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2013). Hlm. 78

a. Analisis

Sejarawan berusaha menerobos pikiran pelaku sejarah dengan cara menghidupkan kembali pikiran mereka dalam pikirannya sendiri atau secara imajiner menempatkan posisinya kedalam pelaku-pelaku sejarah.⁴¹ Hal ini penulis lakukan dengan cara menganalisis data-data yang penulis peroleh dan berusaha menempatkan posisi penulis seolah-olah berada dalam peristiwa tersebut.

b. Sintesis

Sintesis yaitu menyatukan data-data yang telah diperoleh.⁴² Pada tahapan ini penulis berusaha menyatukan data-data yang telah dilakukan analisis kemudian digabungkan dan menjadi sebuah cerita yang kronologis atau membentuk fakta.

5. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan penulisan sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah masa lampau memiliki dimensi waktu, dan diperlukan adanya pembatasan-pembatasan waktu dalam penulisan. Sehingga akan menjadi tulisan yang kronologis.⁴³ Untuk menjadi tulisan yang kronologis dalam penelitian ini penulis mengambil periodisasi tahun 1997-2013 yaitu

⁴¹Murdiyah Winarti, "Metodologi Penelitian Sejarah", *PPT FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia*.

⁴²Kuntowijoyo, *Op.cit.* Hlm. 79.

⁴³Imas Emalia, *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press, 2006). Hlm. 6-7.

sejak peristiwa politik PDI yang Pro Megawati dan PDI lawannya hingga membentuk Aliansi Mega Bintang.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara terperinci dan sistematis adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitain, dan sistematika penulisan.

Bab kedua penulis membahas mengenai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di era Orde Baru yang membahas mengenai konflik awal di tubuh PDI, Pecahnya PDI dalam dua kubu: PDI Soerjadi dan PDI Pro Mega, Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996: Kerusuhan terhadap PDI Pro Mega, Pemilu Tiga Partai (Golkar, PDI, dan PPP) tahun 1997 dan pengaruh Mega Bintang terhadap PPP.

Bab ketiga penulis membahas mengenai Dinamika Aliansi Mega Bintang di Era Orde Baru (1997) yang membahas mengenai Sejarah Terbentuknya Aliansi Mega Bintang, Dinamika Aliansi Mega Bintang di Era Orde Baru (1997), Sikap Mega Bintang terhadap Perpolitikan di Era Orde Baru (1997), Perkembangan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan adanya Aliansi Mega Bintang.

Bab keempat penulis membahas mengenai Pengaruh Aliansi Mega Bintang di Bidang Sosial, Politik dan Hukum yang membahas mengenai Aliansi

Mega Bintang yang terjun ke dalam masyarakat miskin dan kurang mampu untuk membantu mereka agar memperoleh kesetaraan dan keadilan.

BAB II

PARTAI DEMOKRASI DI ERA ORDE BARU

A. Konflik PDI dan Terpecahnya Menjadi Dua Kubu di Era Orde Baru

PDI merupakan gabungan dari beberapa partai yaitu PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katholik. Partai-partai tersebut pada akhirnya dinamakan Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. Pada era Orde Baru rezim Soeharto tidak menyetujui dukungan terhadap Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum PDI. Pemerintah Soeharto menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati dalam KLB atau Kongres Luar Biasa yang diadakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur pada bulan Desember 1993. Akan tetapi, peserta KLB tetap mendukung pencalonan Megawati. Sehingga secara *de facto* Megawati dinobatkan sebagai Ketua DPP PDI periode 1993-1998. Secara *de jure* ditetapkan dalam Munas di Jakarta pada 22-23 Desember 1993.⁴⁴

Sebenarnya kehadiran Megawati Soekarno Putri berhasil menaikkan pamor pada tubuh PDI. Akan tetapi Soerjadi berpikir bahwa pencapaian dari Megawati ini tidak akan disukai oleh pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, rezim Soeharto memanfaatkan peran dan pendukung Soerjadi. Pada Kongres di Medan 20-22 Juni 1996 pada akhirnya Soerjadi diterima Presiden Soeharto

⁴⁴Maghita Primastya, Sejarah PDI Perjuangan, Didirikan Oleh IR Soekarno Tahun 1927 dengan Nama Awal PNI, *Tribunnews.com*, dipublikasikan tanggal 7 Agustus 2019, diakses tanggal 12 April 2021.

menjadi Ketua Umum DPP PDI. Soerjadi dan para pendukung Soerjadi melakukan konsolidasi di berbagai daerah. Sekitar 27 daerah telah berhasil dikonsolidasi PDI pendukung Soerjadi. Hal ini dilakukan karena masih adanya warga PDI di daerah-daerah yang belum setuju terhadap keputusan Kongres Medan. Beberapa daerah masih mendukung Megawati atau menjadi PDI Pro Megawati Soekarno Putri. PDI terpecah menjadi dua kubu yaitu PDI Pro Mega dan PDI Soerjadi.⁴⁵ Latar belakang ini diduga bukan sekedar hanya pendukung Mega atau Soerjadi saja, akan tetapi ini merupakan cara rezim Orde Baru yang menganggap bahwa Orde Lama akan muncul kembali.⁴⁶

Gambar 2.1

PDI pendukung Soerjadi melakukan proses konsolidasi karena beberapa masih tetap Pro Mega



Sumber: Kompas, terbit 27 Juli 1996, hlm. 14.

⁴⁵Kompas, "Usai Diterima Presiden, Soerjadi Mempercepat Proses Konsolidasi", Koran Kompas, terbit 27 Juli 1996. Hlm. 14.

⁴⁶Kompas, "Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27Juli", Koran Kompas, terbit 31 Juli 1996. Hlm. Sambungan dari hlm. 1.

Di tubuh PDI sendiri dianggap telah ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak hasutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah konflik di tubuh PDI. Kegiatan-kegiatannya telah menuju pada hal-hal yang berbahaya dan menyebabkan perpecahan. Panglima ABRI Jenderal TNI Faisal Tanjung mengimbau warga agar tidak mudah terhasut dan bujukan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan yang tidak bertanggung jawab.⁴⁷

Gambar 2.2.

Panglima ABRI: PDI telah diboncengi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab



Sumber: Kompas, terbit 29 Juli 1996, hlm. 1.

Di berbagai tempat memberi tanggapan terhadap perpecahan di tubuh PDI. Di Jakarta Timur, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

⁴⁷Kompas, "Pangab: Jangan Terpancing Hasutan Oknum yang Tak Bertanggung Jawab", Koran Kompas, terbit 29 Juli 1996. Hlm. 1.

mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Yoseph William dan Eddy Sadely, baik selaku pribadi maupun selaku pengurus DPP PDI Jakarta Timur ke Kongres Medan. Di Cilegon, Jawa Barat beberapa Ulama' di Kerisedenan Banten (Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak) menyatakan prihatin atas merebaknya mimbar bebas. Di Yogyakarta simpatisan PDI kumpul di bundaran Universitas Gajah Mada mereka melakukan kumpulan untuk melakukan aksi damai dengan menghimpun PDI Pro Megawati. Di Ambon, DPP PDI Maluku dan cabang-cabangnya masih mendukung DPP PDI pimpinan Megawati Soekarno Putri.⁴⁸

B. Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996

Bentroknya dua kubu di tubuh PDI menyebabkan adanya kerusuhan yang cukup besar yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli. Peristiwa Kudatuli ini terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. Kerusuhan ini dilakukan dalam bentuk penyerbuan terhadap Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan kantor yang dikuasai Megawati Soekarno Putri. Banyak korban yang tewas dan luka-luka dalam penyerbuan tersebut.⁴⁹ 300 orang pendukung Megawati yang berada di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro disesrang dengan lontaran api oleh para oknum yang berkaos merah dan datang dengan menaiki truk. Sebanyak

⁴⁸ "Usai Diterima Presiden, Soerjadi Mempercepat Proses Konsolidasi", *Loc.cit.*

⁴⁹ Agn, "PRD Minta Ungkap Kasus PRD", *Koran Kompas*, terbit tanggal 19 Juli 2004. Hlm. 003.

lima orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kerusuhan berlanjut dengan pembakaran gedung di Jalan Mataram dan Salemba.⁵⁰

Gambar 2.3.

Kronologi peristiwa Kudatuli atau Perusuhan 27 Juli 1996



Sumber: Kompas, terbit 29 Juli 1996, hlm. 1.

Salah satu oknum yang dianggap bermasalah dan berada di belakang aksi tersebut adalah PRD (Partai Rakyat Demokratik). Menko Polhukam dalam pertemuan dengan ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid memaparkan bahwa PRD menunjukkan kemiripan dengan PKI. Istilah-istilah yang digunakan PRD dalam manifesto politik tertanggal 27 Juli 1996. PRD juga tidak berasaskan Pancasila

⁵⁰Koran Sindo, "Pelajaran dari Kasus Kudatuli", Sindonews.com, dipublikasikan tanggal 27 Juli 2012, diakses tanggal 17 Mei 2021.

dan menyerukan rakyat untuk melawan pemerintah. Akan tetapi, PRD ini hanyalah salah satu pihak yang membonceng dalam peristiwa Kudatuli.⁵¹

Gambar 2.4

PRD adalah salah satu oknum yang melakukan perusuhan 27 Juli 1996



Sumber: Kompas, terbit 31 Juli 1996, hlm. 1.

Seusai kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli masih berlanjut dengan pengambilalihan Kantor DPP PDI yang tadinya pusat dari PDI Megawati Soekarno Putri. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No 58 ini diambil alih oleh kelompok DPP PDI hasil Kongres Medan atau kelompok PDI Soerjadi. Sampai Sabtu pagi, kerusuhan masih terjadi di sebagian wilayah Jakarta. Sejumlah gedung pemerintah dan swasta di kawasan Salemba Raya rusak dan sejumlah orang menjadi korban. Pangab Jenderal Faisah Tanjung dalam

⁵¹*Kompas*, "Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27Juli", Koran Kompas, terbit 31 Juli 1996. Hlm. 1, Sambungan dari hlm. 1.

pernyataan di siaran pers memaparkan bahwa kerusuhan yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut sangat memprihatinkan. Kerusuhan tersebut memunculkan keberingasan, korban jiwa, dan kerusakan. Kejadian Sabtu di Jakarta dapat pula dikatakan sebagai akumulasi dari berbagai persoalan salah satunya kemelut berkepanjangan di dalam tubuh PDI.⁵² Jadi pada tanggal 27 Juli tersebut, terjadi dua peristiwa. Pertama, pengambil alihan Sekretariat DPP PDI Jlan Diponegoro No.58 Jakarta Pusat oleh kelompok PDI Sorjadi. Kedua, kerusuhan menyusul bentrok antara massa dengan aparat keamanan.⁵³

Gambar 2.5

Pengambilalihan Kantor DPP PDI Oleh PDI Pendukung Soerjadi setelah kerusuhan 27

Juli 1996



Sumber: Kompas, terbit 29 Juli 1996, hlm. 4.

⁵²Kompas, “Kita Sesalkan Kerusuhan Menyusul Pengambilalihan Kantor DPP PDI”, Koran Kompas, terbit 29 Juli 1996. Hlm 4.

⁵³Ibid, “Peristiwa 27 Juli”. Sambungan hlm 1.

1. Tanggapan Pemerintah terhadap Peristiwa 27 Juli 1996

Pemerintah akan melakukan tindakan secara tegas terhadap pelaku perusuhan 27 Juli 1996 baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dari pihak ABRI juga akan melakukan tindakan yang tegas untuk mencegah tindakan serupa agar tidak terjadi di masa yang akan datang. ABRI akan melakukan tindakan langsung di tempat lokasi kejadian, hal tersebut ditegaskan oleh Letjen TNI Syarwan Hamid. Perintah tembak di tempat diberikan kepada mereka yang mengganggu ketertiban dan merugikan orang banyak. Aparat keamanan akan menembak di tempat kepada para perusuh. Rakor Polkam mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada beberapa siaran media luar negeri yang memberitakan perpolitikan di Indonesia. Berita yang beredar sebagian tidak benar dan dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.⁵⁴

Gambar 2.6.

Pemerintah akan memberikan tindakan terhadap pelaku peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli)



Sumber: Kompas, terbit 31 Juli 1996, hlm. 1.

⁵⁴ "Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli", *Loc.cit.*

2. Tanggapan Organisasi Islam terhadap Peristiwa 27 Juli 1996

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam mengecam keras aksi kerusuhan yang menyebabkan kerusakan, menimbulkan korban, pembakaran transportasi umum dan pribadi serta perusakan gedung-gedung. MUI dan Organisasi Islam Indonesia meminta langkah-langkah pemerintah dan ABRI agar melakukan tindakan tegas dan cepat terhadap pelaku perusahan tersebut. Serta mendesak ABRI untuk melakukan tindakan tegas dan secara hukum terhadap para pelaku. MUI dan Ormas Islam minta agar umat Islam di Indonesia tidak terhasut atau terpengaruh dan tetap tenang dengan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kerusuhan ini juga merupakan dalang dari kelompok-kelompok radikal yang ingin menghidupkan kembali ideologi yang anti Tuhan atau neo komunisme.⁵⁵

Gambar 2.7.

MUI memberikan tanggapan terhadap pelaku kerusuhan 27 Juli 1996



Sumber: Kompas, terbit 31 Juli 1996, hlm. 14.

⁵⁵ "MUI Kecam Kerusuhan 27 Juli 1996".

3. Tanggapan Komnas HAM terhadap Peristiwa 27 Juli 1996

Dalam jumpa pers hari Minggu, Wakil Komnas HAM Marzuki Darusman memaparkan bahwa Komnas HAM sangat menyayangkan kejadian perusuhan 27 Juli 1996 di Kantor Sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro No.58 Jakarta. Komnas HAM juga mengimbau agar pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut dapat menahan diri dan segera menghentikan cara-cara kekerasan. Marzuki juga memaparkan bahwa Komnas HAM akan turun lapangan untuk meneliti lebih lanjut kejadian tersebut.⁵⁶

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Albert Hasibuan memaparkan bahwa pelaku kerusuhan 27 Juli 1996 sebaiknya dituntaskan secara hukum. Para pelaku akan dijerat pasal-pasal dalam KUHP. Penggunaan Subversi dinilai Albert Hasibuan dianggap kurang tepat. Dari sudut pandang HAM dan kepentingan hukum, UU Subversi sudah tidak zamannya lagi untuk digunakan dalam menanggulangi kasus kerusuhan 27 Juli 1996. Walaupun UU tersebut masih berlaku tetapi UU tersebut dianggap melanggar HAM dan sudut hukum jarang sekali digunakan.⁵⁷

⁵⁶ “Pemerintah Akan Tindak Pelaku Kerusuhan 27 Juli”: “Komnas HAM Sesalkan”, *Op.cit*, Sambungan dari hlm. 1.

⁵⁷ *Kompas*, “Pembuat Kerusuhan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP”, Koran Kompas, terbit 31 Juli 1996, hlm. 13.

Gambar 2.8

Usulan Pasal KUHP terhadap pelaku kerusuhan 27 Juli 1996



Sumber: Kompas, terbit 31 Juli 1996, hlm. 13.

C. Pemilu Tiga Partai (Golkar, PDI, dan PPP): Pengaruh Kebijakan Orde Baru terhadap Perjalanan PPP

Pada era Orde Baru, hanya ada tiga partai politik yang diperbolehkan ikut pemilihan umum. Ketiga partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari sembilan partai di Indonesia diringkas menjadi tiga saja. Ini

merupakan cara dari Presiden Soeharto memangkas partai politik.⁵⁸ Di era Orde Baru ini, PPP mengalami krisis identitas karena adanya adanya fusi atau penggabungan dari empat Partai Politik Islam yang merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk penyederhanaan sistem partai di Indonesia. Perjalanan PPP dari masa fusi sampai tahun 1997 penuh dengan guncangan dan menyebablan lika-liku dalam setiap pemilu.⁵⁹ Kekuasaan Soeharto menjadikan pengaruh penting dalam hasil suara pemilu masa Orde Baru terhadap tiga partai tersebut, terutama dalam memperkuat posisi Golkar. Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masa Orde Baru sangat menguntungkan bagi Golkar seperti kebijakan fusi partai politik dan Golkar yang tertuang dalam UU No 3 Tahun 1975. Di samping itu adanya kebijakan Asas Tunggal Pancasila yang menyebabkan perseteruan di dalam tubuh PPP dan PDI di antara kelompok pro dan kontra.⁶⁰

Sebelum diberlakukan Asas Tunggal Pancasila, PPP dengan mudah mengidentifikasi dirinya sebagai partai politik Islam dan mudah dalam menghimpun umat Islam yang berada di bawahnya. Dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 1985 untuk organisasi politik dan kemasyarakatan yang diharuskan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas maka PPP meninggalkan asas lamanya Islam dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya

⁵⁸ Liputan6, Gaya Soeharto Zaman Orde Baru Pangkas Pangkas Partai Politik, *Liputan6.com*, dipublikasikan pada 17 Oktober 2019, diakses pada 17 Mei 2021.

⁵⁹ Tiara Fitriara Huda, "Dinamika Partai Persatuan Pembangunan Pada Era Orde Baru", *Skripsi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember*, (2012). Hlm. ix.

⁶⁰NoviahIffatun Nisa, dkk, "Strategy of GolonganKaryato be Winner in Election Year 1971-1977, *Jurnal Historya*, Vol. 1 No. 1, (2017). Hlm. 144.

asas. Akan tetapi hal ini sangat merugikan bagi PPP karena selama ini dengan massanya dari Islam ia dapat mendapat dukungan dengan mudah. Pada akhirnya PPP kehilangan pengikat atau dukungan untuk menghimpun umat Islam. PPP tidak dapat lagi mengatakan dirinya sebagai partai Islam. Sehingga umat Islam dapat mendukung di antara ketiga partai politik baik PDI, Golkar, maupun PPP.⁶¹ Pemilu tiga partai yang dimulai tahun 1977 atau dikenal dengan pemilu Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto ini selalu dimenangkan oleh Golkar. Pendukung utama Golkar adalah para birokrasi sipil dan militer. Kemenangan Golkar ini secara langsung maupun tidak langsung menjadikan kekuasaan di tingkat eksekutif maupun legislatif di bawah kontrol Golkar.⁶²

Berikut ini tabel perjalanan pemilu 1992-1997 (pemilu Orde Baru) dan pengaruhnya kebijakan Orde Baru terhadap suara PPP.

Tabel 2.1. Hasil Pemilu Orde Baru (1992-1997)⁶³

Hasil Pemilu 1992

Partai	Suara	% (1977)	Kursi	% (1971)	Keterangan
Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	-5,06
PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+1,04

⁶¹ Zain Nur Rusidi, "Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987-2004", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, (2007). Hlm.

⁶² Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 1977-1999, *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, diakses pada 16 Mei 2021. Tersedia: <https://kab-labuhanbatuselatan.kpu.go.id/pemilu-1977-1999/>.

⁶³ *Ibid.* Pemilu 1977-1999.

PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+4,02
------------	-------------------	--------------	-----------	--------------	--------------

Hasil Pemilu 1997

Partai	Suara	% (1977)	Kursi	% (1971)	Keterangan
Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+5,43
PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	-11,84

Setelah melihat dari dua tabel di atas maka bisa disimpulkan bahwa, pada pemilu tahun 1992 sebelum PPP bergabung dengan PDIP, perolehan suara tidak banyak. Namun setelah melakukan aliansi dengan PDIP, suara partai PPP pada pemilu tahun 1997 terlihat memperoleh kenaikan suara yang lebih baik.

BAB III

DINAMIKA ALIANSI MEGA BINTANG DI ERA ORDE BARU (1997)

A. Terbentuknya Aliansi Mega Bintang

Pada masa Orde Baru, PDI sering kali mengalami gejolak dan persengkataan. Terpilihnya Megawati sebagai ketua umum dan ketidak setujuan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto membuat adanya perpecahan di tubuh PDI. PDI mengalami konflik dan terpecah sejak Kongres Luar Biasa PDI yang digelar di Surabaya pada bulan Desember 1993 ketika Megawati terpilih sebagai ketua umum. Popularitas Megawati Soekarno Putri menciutkan nyali Presiden Soeharto. Akhirnya rezim memainkan peran Soerjadi yang akhirnya terpilih dalam Kongres di Medan tahun 1996.⁶⁴ Di era Orde Baru ini juga terdapat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di mana partai ini selalu mengikuti pemilu sepanjang pemilu Orde Baru. Akan tetapi, PPP ini selalu mendapat suara atau kursi yang sedikit dibandingkan dengan Golongan Karya (Golkar).⁶⁵

Antara PDI Pro Mega dan PPP pada akhirnya melakukan pertemuan, di mana dalam pertemuan ini keduanya mencapai kesesuaian pandangan. PDI Pro Mega diwakili oleh Tomo Ngadimo, Hendarsono, Broto, Mbodong, Ambon, dan Heri. Sedangkan dari PPP diwakili oleh Mudrick Setyawan, Hasan Mulachela,

⁶⁴Budiarti Utami Putri, Kisah PDI: Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP, *Tempo.co*, terbit tanggal 10 April 2017, diakses tanggal 12 April 2021.

⁶⁵Noviah Iffatun Nisa, dkk, "Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1977, *Jurnal History*, Vol. 1 No. 1, (2017). Hlm. 146-148.

Sudarsono, dan Zaenal Maarif. Kedua partai ini pada akhirnya mencapai kesepakatan, *pertama*, massa PDI Pro Mega akan mendukung PPP dalam kampanye, *kedua* PPP mengumumkan pencalonan Megawati, *ketiga* apabila PPP tidak konsisten maka dukungan dari PDI Pro Mega dapat ditarik sewaktu-waktu.⁶⁶ Dengan adanya konflik internal di tubuh PDI yaitu Pro Mega dan Pro Soerjadi, maka PDI Pro Mega yang bercorak nasionalis akhirnya membentuk koalisi dengan partai Islam yaitu PPP yang ingin melawan hegemoni rezim Soeharto melalui konsep “Mega Bintang” pada 27 April 1997 di Solo.⁶⁷ Jadi partai nasionalis PDI Pro Mega dengan PPP yang bercorak Islam ini beraliansi dengan tujuan melawan hegemoni rezim Soeharto dan Golkar.⁶⁸ Ketika mengadakan pertemuan, antara PDI Pro Mega dengan PPP membahas mengenai beberapa isu yang menjadi kesamaan antara PDI Pro Mega dengan PPP yaitu hak-hak asasi manusia, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan kepentingan rakyat.

Pada awalnya Mega Bintang menggunakan simbol gambar Megawati dan Bintang atau kombinasi warna hijau dan merah. Kemudian simbol kombinasi isyarat tangan (acungan jempol PPP dan dan PDI Pro Mega berupa tiga jari tegak dengan ibu jari dan telunjuk membentuk lingkaran). Pada perkembangannya Mega Bintang menggunakan identitas gambar bintang putih

⁶⁶Mohammad Thoyibbi, *Menentang Arogansi Kekuasaan: Kasus Mega-Bintang*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999). Hlm. 40.

⁶⁷Yanis Budhi Rochmawati, “Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, (2011). Hlm. 78-79.

⁶⁸Fadrik Aziz Firdausi, *Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru*, *Tirto.id*, dipublikasikan pada 3 Februari 2019, diakses pada 12 April 2021.

dengan latar belakang merah dan hijau.⁶⁹ Kombinasi warna merah (PDI) dan hijau (PPP), gambar Megawati atau Buya Ismail dijadikan sebagai atribut kampanye Mega Bintang.⁷⁰ Kata Mega-Bintang, Mega mengacu pada Megawati Soekarno Putri dan Bintang mengacu pada lambang PPP. Para pendukung Megawati menyatakan diri bergabung dengan PPP.⁷¹

Gambar 3.1.
Simbol Aliansi Mega Bintang



Sumber: Mega Bintang Jakarta – Wordpress.com



Sumber: <https://www.soloskoy.com/2021/07/mega-bintang-siap-bantu-warga-jika.html>

⁶⁹Mohammad Thoyibbi. *Op.Cit* . Hlm. 46

⁷⁰*Kompas*, “Pasca-27 Juli 1996: Fenomena Mega Bintang dan Megawati yang Memilih Golput”, *Kompas.com*, terbit tanggal 29 Juli 2020.

⁷¹Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Loc.cit*.

Aliansi ini tidaklah bersifat struktural, akan tetapi lebih bersifat fungsional. Aliansi ini tidak mempunyai struktur kepengurusan layaknya sebuah organisasi yang ada hanyalah koordinator. Koordinator dari PPP adalah Mudrick, sedangkan koordinator dari PDI Pro Mega adalah Tomo Ngadimo.⁷²

B. Aliansi Mega Bintang di Era Orde Baru (1997)

PDI Pro Mega dan PPP dalam membentuk aliansi Mega Bintang ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melawan hegemoni Golkar dan rezim Soeharto.⁷³ Penerimaan PDI Pro Mega untuk melakukan aliansi dengan PPP ini memiliki motif tersendiri, yaitu pertama, menjaga citra Megawati Soekarno putri untuk menjadi pemimpin yang dikehendaki rakyat. Kedua, sebagai pengimbasan PDI Pro Soerjadi. Ketiga, bentuk protes kepada bentuk kesewenangan dan mencampuri masalah internal partai. Keempat, untuk menggoyang posisi Golkar. PPP sendiri memiliki motif dalam pembentukan Mega Bintang, yaitu *pertama*, untuk menunjukkan solidaritasnya kepada sesama anggota partai politik yang dipinggirkan dalam perpolitikan Orde Baru. *Kedua*, PPP melakukan aliansi kepada PDI Pro Mega untuk memberikan pendidikan politik tentang nilai-nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia, keadilan, dan kejujuran. PPP ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk berani melawan ketidakadilan terutama oleh penguasa.⁷⁴

⁷²Mohammad Thoyibbi, *Op.Cit.* Hlm. 41.

⁷³Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Loc.cit.*

⁷⁴Mohammad Thoyibbi, *Op.cit.* Hlm. 54-58.

Di samping tujuan dari masing-masing PDI Pro Mega dan PPP, Mega Bintang juga memiliki kegiatan sosial yang sangat memperhatikan kehidupan masyarakat. Mega Bintang melakukan kegiatan sosial seperti pembangunan WC umum, melakukan Pendidikan politik kepada para kader, pemasangan lampu mercury di tempat rawan, pemberian bantuan baik makanan, kesehatan, pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan juga pernikahan.⁷⁵

Respon pemerintah Orde Baru sendiri terhadap Aliansi Mega Bintang, pemerintah sempat melarang adanya simbol-simbol dan spanduk-spanduk Mega Bintang. Pemerintah juga melarang adanya spanduk Mega Bintang dalam pemilu PPP.⁷⁶ Pencantuman Mega Bintang dianggap menyalahi peraturan tentang kampanye pemilu. Pemerintah menyatakan bahwa setiap spanduk yang digunakan dalam kampanye harus memperoleh izin dari kepolisian.⁷⁷ Mega Bintang memasang spanduk-spanduk yang bertuliskan “*Kami dukung partai persatuan pembangunan*” atau “*PPP bertujuan bersama kami Mbak Mega*”⁷⁸

Istilah Mega Bintang telah mampu menumbuhkan gairah baru dan membakar semangat kampanye pendukung PPP yang terdiri dari warga Muslim dan pendukung PDI Perjuangan berlatarbelakang nasionalis. Kedahsyatan pengaruh nama Mega Bintang pada gairah pendukung PPP dan PDI Perjuangan tercermin pada semakin maraknya kampanye PPP putaran ketiga dan seterusnya.

⁷⁵*Ibid.* Hlm. 47.

⁷⁶*Kompas*, “Soal Pelarangan “Mega Bintang” dan Dokumen “Operasi Fajar”: Kecemburuan pada PPP”, *Koran Kompas*, terbit tanggal 14 Mei 1997. Hlm. 001.

⁷⁷ USH/BW, “Spanduk Mega Bintang Dilarang”, *Koran Kompas*, terbit 14 Mei 1997, Hlm. 001.

⁷⁸ Mohammad Thoyibbi, *Op.cit.* Hlm. 43.

Adapun tema-tema yang dimunculkan Mega Bintang dalam kampanye meliputi 10 masalah yang dianggap mendasar, yaitu; *pertama* kemerosotan moral yang tengah melanda bangsa Indonesia, *kedua* rendahnya keadilan dan kepastian hukum, terutama yang berpihak kepada rakyat, *ketiga* kesenjangan antara teori dan praktek tentang persamaan, *keempat* kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, *kelima* usaha untuk meningkatkan demokratisasi, *keenam* pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan suap dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, *ketujuh* lemahnya posisi DPR dalam system politik yang ada, *kedelapan* posisi kaum pekerja yang lebih banyak dijadikan sebagai alat produksi, *kesembilan* mahalny biaya pendidikan, *kesepuluh* politisasi terhadap generasi muda.

Gambar 3.2.

Atribut Mega Bintang Sempat dilarang Pemerintah



Sumber: Kompas, terbit 13 Mei 1997



Sumber: Kompas 14 Mei 1997

Setiap kampanye Mega Bintang menyuarakan aksi-aksi sosial. Tema-tema dari Mega Bintang adalah tentang hak-hak asasi manusia, keadilan hukum, keadilan ekonomi, pemerintahan yang bersih dari korupsi, pemilihan umum yang demokratis, dan keperpihakan pada rakyat banyak.⁷⁹

C. Perkembangan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dengan adanya aliansi Mega Bintang ini memberikan suara dan dukungan yang menguntungkan bagi kampanye PPP. Kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat di ibu kota. Kampanye yang diadakan di Jakarta ini juga dimeriahkan oleh atribut-atribut yang bernuansa PDI Pro Mega. Pada kampanye ini banyak terpampang spanduk dan poster yang mengisyaratkan koalisi Mega Bintang. Semarak kampanye dan maraknya pendukung PPP terjadi di berbagai

⁷⁹ Mohammad Thoyibbi, *Op.cit.* Hlm. 48.

tempat, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tangerang.⁸⁰

Gambar 3.3

**Perkembangan Suara dan pendukung PPP di Ibukota dan
Berbagai Tempat**



Sumber: Kompas, terbit 12 Mei 1997

Pemilu pada tahun 1997 ini menunjukkan kenaikan yang begitu signifikan bagi PPP. Di Surakarta perolehan suara PPP dengan kenaikan 150% dari 40.370 suara. Pada pemilu 1992 PPP memperoleh 6 kursi di DPR dan pada pemilu 1997 mendapat 15 kursi di DPR. Di Tegal sekitar 7000an pendukung Megawati menyatakan untuk bergabung dengan PPP. Di Samarinda, ribuan

⁸⁰*Kompas*, "PPP di Ibu Kota, Luar Biasa Makin Tampak, Fenomena "Mega-Bintang"", Koran Kompas, terbit 12 Mei 1997.

warga pendukung Mega membaur dengan kerumunan massa Partai Ka'bah atau PPP.⁸¹ PPP semenjak beraliansi dan membentuk Mega Bintang selama masa pemilu 1997 berhasil mengumpulkan massa relatif banyak. Berkat dukungan Mega Bintang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih kesuksesan.⁸²

Gambar 3.4.

PPP Mendapat massa kampanye yang relatif banyak dengan adanya Mega Bintang



Sumber: Kompas, terbit 3 Oktober 1997

Secara nasional PPP mengalami kenaikan 17% dari pemilu 1992 menjadi 22,4% pada pemilu 1997. Akan tetapi PDI sendiri justru mengalami penurunan. Pada pemilu 1992 PDI memperoleh 13 kursi di DPR, sedangkan pada pemilu 1997 PDI mengalami penurunan. Penurunan suara PDI ini dikarenakan warga PDI banyak yang beralih mendukung PPP. PDI mengalami

⁸¹Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Loc.cit.*

⁸² TOV/ASA, "PPP Solo Realisasikan Kegiatan Mega Bintang", *Koran Kompas*, terbit tanggal 3 Oktober 1997. Hlm. 14.

penurunan dari 14,895% pada pemilu 1992 menjadi 3,07% pada pemilu tahun 1997.⁸³

Meningkatnya perolehan suara PPP dalam kampanye dan pemilu ini terjadi karena beberapa hal, *pertama*, sejak disepakatinya terbentuk Aliansi Mega Bintang dibentuk kesepakatan bahwa massa PDI Pro Mega akan memberikan dukungan kepada PPP.⁸⁴*Kedua*, kepemimpinan Mudrick S.M. Sangidu sebagai ketua DPC PPP Surakarta sangat disegani dan dihormati karena memberikan pengaruh yang sangat besar. Mudrick memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perpolitikan di era Orde Baru. Keberaniannya melawan ketidakadilan dan keterbukaan akan demokrasi. *Ketiga*, konflik yang terjadi pada tubuh PDI.⁸⁵

Tabel 3.1. Perbandingan hasil pemilu 1992 dan 1997

PEMILU 1992

Partai	Suara	Persen	Kursi
Golkar	66.599.331	68,10	282
PPP	16.624.647	17,01	62
PDI	14.565.556	14,89	56

⁸³ Mohammad Thoyibbi, *Op.cit.* Hlm. 51.

⁸⁴*Ibid.* Hlm. 40.

⁸⁵ M. Fachri Adnan, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum", *Jurnal Demokrasi Vol. 1 no 1*, 2022. Hlm. 45-49.

PEMILU 1997

dfPartai	Suara	Persen	Kursi	Keterangan
Golkar	84.187.907	74,51	325	Kenaikan persen dan kursi
PPP	25.340.028	22,43	89	Naik persen dan kursi
PDI	3.463.225	3,06	11	Penurunan persen dan kursi

86

D. Sikap Mega Bintang terhadap Perpolitikan di Era Orde Baru (1997)

Pemilu tahun 1997 membuat Megawati tidak dapat ikut sebagai peserta dalam pemilu karena tidak boleh ada partai dengan simbol ganda.⁸⁷ Dengan adanya Aliansi Mega Bintang mencapai kesepakatan bahwa massa PDI Pro Mega akan mendukung PPP dalam kampanye.⁸⁸ Di berbagai tempat juga menunjukkan bahwa para pendukung PDI Pro Mega memberikan dukungan dan menyatakan bergabung dengan PPP.⁸⁹ Meskipun PDI Pro Mega mayoritas mendukung PPP dalam kampanye, Megawati Soekarno Putri sendiri memilih

⁸⁶Verelladevanka Adryamarthanino, Pemilu Tahun 1997: Peserta, Pelaksanaan, dan Pemenang, *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/27/130000679/pemilu-tahun-1997--peserta-pelaksanaan-dan-pemenang>. Diakses pada 14 Januari 2022.

⁸⁷Yanis Budhi Rochmawati, “Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004”, *Skripsi Universitas SebelasMaret*, (2011). Hlm. 88.

⁸⁸ Mohammad Thoyibbi, *Loc.cit*

⁸⁹Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru, *Loc.cit*.

untuk golput. Megawati menyatakan untuk tidak akan memberikan suaranya bagi PPP.⁹⁰

Gambar 3.5.

Megawati dalam Pesan Hariannya, bahwa segenap pendukung PDI Tidak Ikut Mengikuti Kampanye 1997



Sumber: Kompas, terbit 24 April 1997

Pada awalnya Megawati dalam pesan hariannya menyatakan bahwa segenap pendukung PDI Megawati di seluruh penjuru Tanah Air tidak akan mengikuti kampanye pemilu tahun 1997. Langkah PDI Pro Megawati ini diambil untuk menghindari kekerasan karena adanya provokasi dari pihak tertentu.⁹¹ Sikap Megawati sebagai seorang pemimpin informal, dalam tidak menggunakan hak pilihnya dianggap dapat mempengaruhi masyarakat banyak.⁹²

⁹⁰Azhar, Iphong S, "Aliansi Mega Bintang, Perolehan Suara OPP, dan Kekerasan Politik, *Koran Kompas*, terbit 28 Mei 1997.

⁹¹JL, "PDI Pro-Mega Tak Akan Ikut Kampanye", *Koran Kompas*, terbit 24 April 1997. Hlm. 14.

⁹² BW/SMN/ASA, "Kassospol: Sebagai Pimpinan Informal, Sikap Megawati Bisa Pengaruhi Masyarakat", *Koran Kompas*, terbit 24 Mei 1997, Hlm. 014.

Megawati akhirnya memberikan kebebasan kepada pendukungnya untuk memberikan suara kepada PPP. Akan tetapi, Megawati sendiri tetap memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pemilu 1997.⁹³

Gambar 3.6.

Sikap Megawati (Golput) Dikhawatirkan Mempengaruhi Masyarakat Banyak



Sumber: Kompas, terbit 24 Mei 1997.

Pemilu 1997 merupakan pemilu yang dilakukan secara serentak tepatnya pada 29 Mei 1997 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD periode 1997-2002. Pemilu ini diikuti oleh dua partai politik yaitu PPP dan PDI dan juga Golongan Karya. Megawati menyatakan golput karena menganggap bahwa parpolnya dideligitimasi oleh rezim Orde Baru.⁹⁴

⁹³Ipong S Azhar, "Aliansi Mega-Bintang, Perolehan Suara OPP, dan Kekerasan Politik, *Koran Kompas*, terbit 28 Mei 1997.

⁹⁴ Ahmad Hasan Afandi, *Kontroversi Politik Kyai Tarekat: Studi Pergeseran Orientasi Politik Kyai Tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah*, (PT Scopindo Media Pustaka, 2021). Hlm. 256.

Gambar 3.7

Perolehan Suara OPP dan Pernyataan Megawati tidak Menggunakan Hak Pilihnya



Sumber: Kompas, terbit 28 Mei 1997.

BAB IV

PENGARUH ALIANSI MEGA BINTANG DALAM BIDANG SOSIAL DAN POLITIK

A. Kegiatan Politik

Pada pemilu 1997 yang lalu, berlakunya sistem partai *hegemonic* selama pemerinthan Orde Baru. Sistem ini ialah sistem yang dimana sebuah politik di satu partai membatasi adanya kompetisi formal maupun de facto antara partai politik dalam meraih kekuasaan.⁹⁵ Hal ini tampak jelas kelihatan untuk memelihara partai Golkar. Golkar didukung pemerintah, upaya pemerintah memelihara system partai hegemonic dalam pemilu 1997 dilakukan dengan membatasi kompetisi sehat terbuka di antara partai politik dalam pemilu.⁹⁶ Golkar bersama pemerintah mencoba menutup kemungkinan kesempatan partai lain, terutama PDI. Sesudah PDI berantakan kemudian Golkar hanya memiliki satu rival yaitu PPP, kompetisi antara Golkar dan PPP menjadi sangat kuat dan cenderung menuju ketegangan politik antar keduanya. Hal ini terjadi bukan hanya untuk menarik simpatisan PDI pengikut Megawati, tetapi kedua partai juga berusaha menarik dan memperebutkan simpati umat Islam. Dan dalam hal ini Golkar melakukan upaya “Golkarisasi” di daerah-daerah muslim basis PPP.

⁹⁵ Mohammad Thoyibi.1999. “ *Menentang Arogansi Kekuasaan Kasus Mega Bintang* “. Muhammad University Press, hlm 13

⁹⁶ Lambang Trijono. 1997. “ *Paradoks Demokrasi di Indonesia : Kerusuhan Pada Masa Kampanye Pemilu 1997* “. JSP Vol. 1, No. 2, hlm 30

Dengan menggunakan mesin birokrasi yang ada mereka cenderung melakukan apapun untuk kemenangan Golkar, salah satu contoh di Jawa Tengah banyak terjadi kerusuhan selama kampanye, mereka secara tidak langsung memerintahkan jajaran birokrasi di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan mewarnai fasilitas-fasilitas publik dan pribadi dengan warna kuning simbol Golkar / “Kuningisasi”. Hal ini meluas ke berbagai daerah dan hampir di seluruh Jawa Tengah. Aktivitas inilah yang telah menciptakan ketegangan sosial sejak jauh sebelum kampanye.

Di Solo, ketegangan muncul antara PPP dan PDI dengan birokrasi yang ditandai dengan perang warna, “Kuningisasi-Putihisasi” yang berlangsung selama satu bulan. Selain itu pemerintah lokal juga seringkali bertindak tidak adil dalam menertibkan bendera yang dipasang sebelum kampanye. Pemerintah lokal seringkali mencabut bendera atribut PPP akan tetapi membiarkan bendera atribut Golkar berkibar, hal ini juga yang membuat pendukung PPP marah. Karena hal itulah banyak terjadi konflik-konflik dan ketegangan sosial menjelang pemilu 1997 yang tidak teratasi dan akhirnya menumpuk dan meletus menjadi kerusuhan.⁹⁷ Militer dalam hal ini sebenarnya memiliki posisi yang strategis untuk menjadi mediasi konflik-konflik yang ada di masyarakat, akan tetapi posisi militer menjelang pemilu kurang netral. Militer bukan hanya dekat dengan birokrasi, bahkan pemimpin militer tingkat atas jelas sekali keberpihakannya kepada Golkar dengan bergabung secara langsung dalam acara Golkar ke berbagai daerah Bersama dengan pemimpin elit Golkar sebelum kampanye pemilu dimulai. Dalam hal ini

⁹⁷ Lambang Trijono. *“Mengantisipasi kerusuhan di Jateng”*. Bernas 26 April 1997

Indonesia mengalami krisis moneter menjelang pemilu 1997, sehingga konflik-konflik yang tidak tertangani meletup menjadi kekerasan politik.

Meskipun Mega Bintang tidak memiliki struktur organisasi, akan tetapi mereka telah melakukan berbagai kegiatan untuk menunjukkan keberadaan dan perannya. Selain kegiatan yang berupa partisipasi dalam kampanye PPP dan pengawasan dalam pemilu, Mega Bintang juga telah melakukan beberapa kegiatan lain, baik yang bersifat politik maupun sosial.⁹⁸

Kegiatan politik yang dilakukan Mega Bintang antara lain adalah melakukan Pendidikan politik terhadap para kader terutama kader PDI P, baik di pos-pos maupun di kantong-kantong massa. Pembinaan juga dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan pada saat masyarakat berkumpul, dalam acara hajat keluarga, kegiatan pengamanan lingkungan, dan dalam acara slametan dengan rangka mendoakan warga yang sudah meninggal. Mega Bintang juga terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan menjadi saksi dalam pemilu atas nama PPP.

B. Kegiatan Sosial

Pada masa Orde Baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan pacuan bagi pemerintah. LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan

⁹⁸ M. Ryaas Rasyid. "Analisis Kerusuhan Kampanye". Kompas terbit tanggal 5 Juni 1997

oleh perseorangan maupun kelompok dengan tujuan memberikan pelayanan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan ataupun keuntungan dari kegiatannya.⁹⁹

Di Indonesia kelahiran dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat disebut dengan LSM. Sejak awal kelahirannya hakikat para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah wadah/media/alat untuk memperjuangkan suatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat.¹⁰⁰

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru membawa suasana yang baru pula bagi kehidupan masyarakat. LSM dan organisasi non-pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi yang telah leluasa muncul dan berkembang dengan demikian pesatnya. Hal ini terlihat baik dari organisasi maupun dari segi kegiatannya.¹⁰¹

LSM di Indonesia mengalami puncak perkembangannya pada tahun 1990-an, jumlah LSM di seluruh Indonesia kurang lebih sekitar 13.500. Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berlangsung lama, hal ini dikarenakan ada factor yang menggerogoti dari dalam maupun factor luarnya. Seperti halnya jatuhnya kekuasaan rezim otoriter Soeharto pada tahun 1997. Kondisi inilah yang membuat Indonesia bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi dan kerentanan di bidang sosial budaya.¹⁰²

⁹⁹ Meuthia-Ganie-Rochman dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed).2002. *"Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat kendala dan Peluang Menuju Demokrasi"*. Jakarta: LP3ES, hlm 182

¹⁰⁰ Ichsan Malik. 2004. *"Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan"*. Jakarta: Buku Kompas, hlm 6

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 7

¹⁰² *Ibid*, hlm. 9

Salah satu LSM yang ada di Indonesia ini adalah LSM Mega Bintang. Mega Bintang merupakan akar rumput dari PDI perjuangan dan PPP tahun 1997, saat itu gerakan ini diluncurkan untuk melawan hegemoni Presiden Soeharto dan Golkar. Namun setelah itu, Mega Bintang ini menjadi sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial, Lembaga hukum, dan ormas yang dipimpin oleh Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe yang berdiri pada tahun 6 Juni 1998. Mudrick Sangidoe inilah merupakan tokoh pendiri gerakan Mega Bintang di Solo.¹⁰³ Mudrick Sangidoe tidak sendiri dalam membangun dan mendirikan Yayasan tersebut, ada beberapa rekannya yang siap membantu dengan sukarela yakni Abdullah Al-Jufri, Boyamin, Arif Sahudi, dan Prijatno. Tujuan dari pendirian yayasan ini utamanya adalah kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat.¹⁰⁴

Gambar 4.1
Panglima Mega Bintang Mudrick Setyawan Malkan Sangidoe



¹⁰³ Mediasiber. 2020. "Skandal Dibalik Mudrick Sangidoe, pentolan Ormas Mega Bintang". Dalam <https://www.mediasiber.com/utama/skandal-dibalik-mudrick-sangidu-pentolan-ormas-mega-bintang>, diakses pada hari Minggu 04 Desember 2022 pukul 19.48 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan narasumber (Mohammad Annas) selaku Kepala Staff LBH Mega Bintang

Sumber : <https://www.soloskoy.com/2021/07/mega-bintang-siap-bantu-warga-jika.html?m=1>

Selama 16 tahun berkiprah di masyarakat, Mega Bintang sudah melaksanakan berbagai program sosial bagi masyarakat, antara lain

1. Membangun 41 MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

Mega Bintang membangun 41 MCK yang tersebar di wilayah Surakarta, Sragen, Wonogiri dan Sukoharjo, pembangunan ini dimulai pada tahun 1998. Setiap pembangunan MCK juga disertai pengadaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang mampu membina dan mendidik putra putri warga masyarakat sekitar.

Salah satu pembangunan MCK yang dilakukan Mega Bintang terletak di Jl.Irawan Jalan Makam, Bergolo, Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. MCK ini dibangun pada tahun 2000, dan tentunya pembangunan ini dipelopori oleh Bapak Mudrick SM Sangidoe selaku pendiri yayasan. Bahkan sampai hari ini, MCK ini masih sangat layak digunakan karena selalu di rawat oleh masyarakat sekitar dan yayasan Mega Bintang sendiri. Menurut Bapak Wibowo selaku ketua RT setempat menyampaikan bahwa pada saat itu adanya MCK ini sangat membantu masyarakat karena sebagian masyarakat tidak mempunyai MCK yang layak untuk digunakan. ¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Narasumber Wibowo ketua RT 04 wilayah Serengan, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022

Gambar 4.2

MCK yang dibangun yayasan Mega Bintang



Sumber: dokumentasi pribadi

MCK tersebut tidak lupa juga disertai dengan lampu penerangan lampu mercury untuk menunjang masyarakat Ketika akan menggunakan prasara tersebut. Kegiatan sosial ini dilgerakkan tentunya oleh pendiri yayasan yakni Mudrick SM Sangidoe beserta tokoh-tokoh lain yang ikut membantu secara sukarela.¹⁰⁶

2. Bantuan buku dan alat tulis

Pemberian sumbangan buku-buku tulis dan alat tulis ini dilakukan yayasan Mega Bintang pada tahun 1999 dengan tujuan kemanusiaan dan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Narasumber Mohammad Arnaz selaku Kepala Staff LBH Mega Bintang pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022.

kesetaraan. Mereka selalu menjunjung hak-hak masyarakat kurang mampu agar dapat setara dengan orang lain.

Sumbangan ini ditujukan bagi anak-anak SD yang mempunyai orang tua kurang mampu dan anak-anak TPA yang selalu ingin belajar. Sasaran yayasan ini adalah anak-anak TPA dan Sekolah Dasar yang mempunyai perekonomian di bawah.

Salah satu Sekolah Dasar yang menerima bantuan dari yayasan Mega Bintang adalah SD Negeri Kartodipuran No 21 yang beralamat di Jl. Wirotamtomo No 14, Jayengan, Kecamatan Serengan, Surakarta. Yayasan memilih anak-anak SD yang mempunyai keluarga kurang mampu, sehingga mereka membantu dengan memberikan sumbangan berupa buku dan alat tulis untuk sekolah.

Taman Pendidikan Al-Quran yang selalu menjadi tujuan yayasan Mega Bintang untuk berbagi adalah di Masjid Al-Muttaqien. Masjid ini berada di samping kantor LBH yayasan Mega Bintang yang beralamat di Jl. Kartopuran No.241A, Jayengan, Kecamatan Serengan, Surakarta.

Gambar 4.3

Masjid Al-Muttaqien tempat pendirian TPA



Sumber : Dokumentasi pribadi

Bapak Ari selaku ketua Linmas (Perlindungan Masyarakat) Kelurahan Jayengan mengatakan bahwa adanya yayasan Mega Bintang yang selalu membantu masyarakat kurang mampu ini dinilai sangat positif. Ia sangat berpendapat bahwa adanya yayasan Mega Bintang ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam hal perekonomian.¹⁰⁷

3. Mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

Kegiatan sosial lain yang dikembangkan oleh yayasan Mega Bintang adalah Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang yang beralamat di Jl. Kartopuran No.241 A, Jayengan, Kecamatan Serengan,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Narasumber Ari selaku Ketua Linmas Kelurahan Jayengan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022

Surakarta. Lembaga ini tidak memungut biaya namun selalu konsisten memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat kecil. Yayasan ini muncul pada bulan Maret 2004 yang juga didirikan oleh Mudrick SM Sangidoe beserta teman-temannya yakni Bapak Muhammad Arnaz, Husein Ibrahim, Ali Ibrahim, Muchsin Al-Jufri dan Abdullah Al-Jufri.¹⁰⁸

Gambar 4.4

Kantor LBH Mega Bintang



Sumber: Dokumentasi pribadi

Tujuan pendirian LBH ini adalah (1) membantu masyarakat ekonomi kebawah atau kurang mampu agar mendapat bantuan hukum secara adil, (2) menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum, (3) penyuluhan hukum gratis kepada masyarakat. Sebagian besar korban ketidakadilan adalah masyarakat kurang mampu, sehingga hal ini perlu

¹⁰⁸ Wawancara dengan Narasumber Muhammad Arnaz selaku Kepala Staff LBH Mega Bintang, pada hari Selasa, 06 Desember 2022

dibela dengan semestinya. Lembaga ini tidak pernah vakum sejak pendirian hingga sampai saat ini.¹⁰⁹

4. Membangun dan memelihara pos polisi

Kerusuhan di Solo tahun 1998 yang disebabkan oleh reformasi dan lengsernya presiden Soeharto. Juga pada tahun 1999 sesaat setelah pilpres yang dimana Megawati kalah dalam pilpres tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan massa merah marah dan menghancurkan pos-pos polisi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dasar tergeraknya hati yayasan Mega Bintang untuk melakukan kegiatan sosial. Yayasan Mega Bintang membangun pos-pos polisi dibantu infak dari bapak Taufik Imas sebesar 47juta pada tahun 2001. Kerusuhan yang menjarah kawasan perbelanjaan, bank, pertokoan serta pos-pos polisi mengakibatkan banyak nyawa melayang dan banyak pula kerugian harta.

Pada tahun 2001 inilah yang mendasari yayasan Mega Bintang untuk ikut membantu dan merawat pos polisi agar bisa layak digunakan kembali. Pembangunan 11 pos polisi ini tersebar di wilayah Solo dan Sukoharjo, pembangunan pos polisi ini tersebar di sepanjang Jalan Slamet Riyadi tepatnya di perempatan Mall Solo Square ke timur sampai ke perempatan Nonongan.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Narasumber Destiya Rustamiana selaku advokat LBH Mega Bintang pada hari Selasa, 06 Desember 2022

Gambar 4.5

Pos Polisi Manahan yang dibangun oleh yayasan Mega Bintang



Sumber: Dokumentasi pribadi



Sumber: Dokumentasi pribadi

Tujuan pembangunan pos-pos polisi ini senantiasa karena yayasan Mega Bintang peduli dengan para polisi karena pada saat itu pos-pos polisi mengalami kerusakan dikarenakan adanya kerusuhan pada tahun

1998 dan 1999. Hal itu juga yang menjadi dorongan yayasan Mega Bintang untuk membantu polisi agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.

5. Membangun dan merawat sumber air

Air merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia, tanpa air manusia tidak bisa hidup dan berkembang. Hal inilah yang mendasari yayasan Mega Bintang untuk memberikan suplai air bersih bagi masyarakat yang ada di pelosok.

Pemberian bantuan air bersih ini dilakukan untuk masyarakat pelosok yang masih kesusahan untuk memperoleh air bersih di wilayah Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri. Salah satu pemberian bantuan air bersih ini ada di desa Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri pada tahun 1999, dan juga ada di Desa Ngargoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri pada tahun 2011.

Gambar 4.6

Bantuan air bersih di Wonogiri



Sumber: Dokumentasi dari LBH Mega Bintang

Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berkala oleh yayasan Mega Bintang sejak tahun 1999 dengan tujuan agar masyarakat pelosok yang kesusahan mendapatkan air bersih dapat menggunakan air bersih.

6. Bantuan Sembako

Tidak semua masyarakat mempunyai kelebihan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang bergizi, padahal makanan yang bergizi inilah yang membuat manusia dapat hidup menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit.

Yayasan Mega Bintang selalu memperhatikan masyarakat-masyarakat kecil, mereka memberikan bantuan sosial secara rutin, berupa sembako dan peralatan ibadah kepada masyarakat miskin di berbagai daerah di Surakarta, Boyolali, dan Sragen. Hal ini sudah dilakukan yayasan Mega Bintang sejak tahun 2011 dan dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulannya.¹¹⁰

Gambar 4.7

Bantuan Sembako



Sumber : Dokumentasi dari LBH Mega Bintang

Biasanya yayasan Mega Bintang lebih mengutamakan pembagian sembako ini kepada masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar yayasan. Pembagian sembako ini biasanya diserahkan kepada ketua RT setempat agar dibagikan kepada masyarakatnya yang dianggap kurang

¹¹⁰ Ali. 2022. "25 Tahun Mega Bintang, Tetap Konsisten Membela dan Memperjuangkan Kepentingan Wong Cilik". Joglosemar, dalam <https://joglosemarnews.com/2022/06/25-tahun-mega-bintang-tetap-konsisten-membela-dan-memperjuangkan-kepentingan-wong-cilik/>, diakses pada Minggu 04 Desember 2022 pukul 20.05 WIB

mampu, dan sudah pernah juga yayasan Mega Bintang membagikan sembako ini di Gedung Umat Islam yang terletak di samping kantor LBH Mega Bintang. Agar masyarakat tidak berebutan, yayasan Mega Bintang berinisiatif membuat kupon untuk ditukar dengan sembako tersebut. Pembagian sembako ini dilakukan oleh yayasan Mega Bintang minimal sebulan sekali.

7. STNK Becak gratis

Pekerjaan menjadi tukang becak biasanya diidentikan dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, penghasilannya pun tidak menetap dan bahkan tidak mendapatkan uang sama sekali. Masyarakat seperti inilah yang perlu dibantu dan didukung perihal perekonomiannya.

Pada tahun 2004, yayasan Mega Bintang berinisiatif dan mewujudkan kegiatannya untuk membantu tukang becak. Yayasan ini memberikan bantuan gratis tanpa memungut biaya apapun untuk membuatkan STNK (Surat Tanda Naik Kendaraan) dan membagikan becak bagi tukang becak yang ada di wilayah Solo kurang lebih sekitar 100 tukang becak.

Pembagian STNK becak gratis ini ada di wilayah kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Serengan, dan ada sedikit yang berada di Kecamatan Laweyan. Salah satu yang menerima sumbangan becak dan STNK gratis dari yayasan Mega Bintang yakni bapak Sutiman, ia mengaku bahwa sangat terbantu adanya pembagian becak dan STNK

gratis tersebut. Karena dengan becak tersebut, bapak Sutiman bisa mendapatkan uang dari hasil mengayuh becaknyanya.¹¹¹

8. Gerobak Sampah dan Caping

Pengangkut sampah juga termasuk masyarakat dengan ekonomi di bawah. Ini juga menjadi sasaran bagi yayasan Mega Bintang untuk mengencarkan aksi sosialnya.

Tahun 2010 inilah menjadi tahun bagi yayasan Mega Bintang untuk membantu tukang pengangkut sampah dengan membagikan gerobak sampah kepada tukang sampah yang gerobaknya hilang dan bahkan ada yang rusak dan juga pembagian caping gratis sebagai pelindung kepalanya. Di gerobak sampah ini ditandai dengan logo Mega Bintang agar dijadikan sebagai pengingat.

Gambar 4.8

Bantuan gerobak sampah



Sumber: Dokumentasi pribadi

¹¹¹ Wawancara dengan Narasumber Sutiman selaku tukang becak, pada hari Sabtu, 10 Desember 2022

Tujuan dari pembagian gerobak sampah ini agar membantu tukang sampah agar tetap bisa menjalankan pekerjaannya. Bapak Budi adalah salah satu warga Kartodipuran, Jayengan yang menerima sumbangan gerobak sampah, ia mengatakan bahwa sumbangan gerobak ini sangat membantu ia karena pada saat itu gerobak sampahnya hilang diambil orang. Ia menerima sumbangan gerobak sampah pada tahun 2011 dan sampai saat ini gerobak tersebut masih digunakan setiap harinya untuk mengangkut sampah di sekitar Kelurahan Jayengan.¹¹²

9. Pemberian Bantuan Beras

Di Indonesia ini selain air, nasi juga menjadi makanan pokok masyarakat. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak bisa makan nasi dengan layak. Masih banyak pula masyarakat yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan memberikan nasi yang layak.

Sejak yayasan Mega Bintang ini muncul yakni tahun 1999, mereka sudah berinisiatif untuk memberikan sumbangan beras gratis bagi masyarakat kurang mampu. Walaupun tidak banyak, namun setidaknya bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan makannya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berkala sejak tahun 1999.

Pembagian beras ini biasanya dibagikan di Gedung Umat Islam yang berada di Jalan Kartodipuran no 241 A, Jayengan, Serengan, Surakarta.

¹¹² Wawancara dengan Narasumber Budi selaku tukang sampah pada hari Sabtu, 10 Desember 2022

Dan selain dibagikan di gedung Umat Islam, yayasan Mega Bintang menyerahkannya langsung kepada ketua RT Kartodipuran untuk dibagikan langsung kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu.

Gambar 4.9

Bantuan sumbangan beras



Sumber: Dokumentasi dari LBH Mega Bintang



Sumber: Dokumentasi dari LBH Mega Bintang

Sampai tahun 2013 ini pembagian beras masih konsisten selalu berjalan setiap bulannya, agar tidak membuat masyarakat berebut,

mereka membuat kupon yang bisa ditukar dengan beras senilai 2,5 kg.¹¹³ Banyak masyarakat yang senang dan selalu menunggu pembagian beras yang dilakukan oleh yayasan Mega Bintang ini, mereka senang karena dengan pembagian beras ini masyarakat sedikit terbantu.

10. Pemberian bantuan dan relawan korban gempa bumi di Yogyakarta dan banjir di Solo

Bencana alam gempa bumi bekekuatan 5.9 SR yang menimpa warga Yogyakarta pada Mei 2006 mengakibatkan banyak nyawa melayang, rumah roboh, dan kerugian yang sangat banyak. Adanya isu yang menyatakan bahwa akan ada gempa susulan mengakibatkan masyarakat berlarian berbondong-bondong ke jalan raya sehingga banyak warga yang terluka karena kecelakaan dan terinjak-injak.

Walaupun anggota yayasan Mega Bintang masih sedikit, rasa empati mereka menggerakkan hati sehingga mereka mengirimkan bantuan berupa makanan, genset, selimut, terpal dan obat-obatan untuk masyarakat Yogyakarta yang terdampak gempa bumi. Tujuan yang dilakukan senantiasa atas rasa kemanusiaan, sehingga mereka melakukan ini dengan sukarela dan ikhlas.

Musibah yang sama juga di alami di Solo, tepatnya pada Desember 2007 warga masyarakat Solo merasakan banjir yang kurang lebih

¹¹³ Wawancara dengan Narasumber Misniati selaku ketua RT 15 Kartodipuran pada hari Sabtu, 10 Desember 2022

mencapai 3 meter. Banyak rumah warga yang terendam, yang paling parah terjadi di daerah Joyotakan dan Serengan. Banjir ini diakibatkan karena sungai Bengawan Solo meluap, sehingga warga dievakuasi ke lokasi yang lebih aman seperti masjid, kantor kelurahan hingga pabrik yang letaknya jauh dari lokasi banjir tersebut.

Dengan bencana tersebut, yayasan Mega Bintang dengan rasa kemanusiaannya tergerak untuk membantu. Mereka mengirimkan relawan untuk membantu evakuasi korban banjir dan mengirimkan sejumlah makanan, karena pada saat itu sumber makanan hanyut terkena banjir.

Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh LSM Mega Bintang ini tetap bertumpu dengan jargonnya yakni “Bolone Wong Cilik”. Mega Bintang selalu mengutamakan untuk membantu orang-orang kecil dan kurang mampu.

Seiring berjalannya waktu, kemudian yayasan Mega Bintang mendirikan lembaga bantuan hukum Mega Bintang pada bulan Maret 2004. LBH ini diketuai oleh pendiri yayasan yakni Mudrick Setyawan Malkan Sangidoe, dan di bawahnya ada Mohammad Annas, Husein Ibrahim, Ali Ibrahim, Abdullah Al-Jufri, dan Muchsin Al-Jufri. Hingga saat ini anggota LBH Mega Bintang berjumlah 18 orang.¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara dengan Narasumber Mohammad Annas selaku Kepala Staff pada hari Selasa, 06 Desember 2022

Gambar 4.10



Sumber: Instagram LBH Mega Bintang (lbhmegabintang.official)

LBH Mega Bintang ini merupakan badan hukum terdaftar Kemenkumham dan tidak memungut biaya atau gratis bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.¹¹⁵ Sejak didirikannya LBH ini yaitu tahun 2004 hingga tahun 2013, lembaga ini membantu dan menyelesaikan masalah dengan sendiri tanpa bantuan dari negara, tetapi masih ada donatur yang sukarela memberikan bantuan. Kemudian pada tahun 2013, lembaga ini akhirnya tercatat di Kemenkumham dan sekarang sudah dibantu oleh Negara.

Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat jika mengadukan kasus dugaan pelanggaran asas keadilan-kemanusiaan oleh oknum aparat. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung dengan mengunjungi kantor LBH Mega Bintang yang beralamat di Gedung Umat Islam, Jalan Kartopuran No 241A Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atau melalui telepon di 0271-64443 dan HP atau WA di 081901064606.¹¹⁶

¹¹⁵ Youtube LBH Mega Bintang

¹¹⁶ Soloskoy.com. 2021. "LBH Mega Bintang Siap Bantu Warga Jika Terjadi Pelanggaran Asas Keadilan-Kemanusiaan Saat PPKM Darurat". Dalam

C. Respon Masyarakat

Mudrick akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga mencitrakan dirinya sebagai wakil rakyat yang mau memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Lewat yayasan Mega Bintang inilah Mudrick memulai aksi sosialnya, dan hal tersebut masih dilakukan sampai saat ini¹¹⁷. Masyarakat Jayengan Kartopuran sangat terbantu dengan adanya yayasan Mega Bintang, terutama dengan adanya LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Mega Bintang, hal ini juga disampaikan sendiri oleh masyarakat sekitar. Penulis berhasil mewawancarai beberapa Narasumber yang terletak di sekitar yayasan Mega Bintang ini dengan hasil sebagai berikut:

1. Muhammad Arnaz

Beliau adalah salah satu pendiri Bantuan Lembaga Hukum Mega Bintang yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Staff di lembaga tersebut sejak tahun 2004. Ia menyampaikan bahwa yayasan Mega Bintang ini selalu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan bantuan. Tidak hanya dalam bidang hukum saja, namun yayasan Mega Bintang juga membantu masyarakat dalam hal sosial.

2. Destiya Rustamiana

Destiya Rustamiana merupakan salah satu anggota yang berada di LBH Mega Bintang. Beliau adalah advokat yang mengurus keluhan dan

¹¹⁷ <https://www.soloskoy.com/2021/07/mega-bintang-siap-bantu-warga-jika.html?m=1>, diakses pada 04 Desember 2022 pukul 20.35 WIB

permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengadukan ke pihak LBH. Desti membantu masyarakat tersebut secara sukarela, hal ini sudah ia lakukan sejak ia melebur dengan yayasan Mega Bintang.

3. Ibu Misniati

Ibu Misniati adalah ketua RT 15 kelurahan Jayengan, beliau menceritakan dengan adanya LBH Mega Bintang masyarakat di sekitar sangat terbantu. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan yang ia sampaikan kepada penulis, bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya LBH tersebut. Justru masyarakat menerima dengan baik kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh LBH Mega Bintang ini kepada masyarakat kelurahan Jayengan dan sekitarnya.

4. Bapak Ari

Keamanan masyarakat tidak bisa tercipta tanpa campur tangan desa atau Linmas, bapak Ari lah salah satunya beliau adalah ketua Linmas di kelurahan Jayengan. Beliau menceritakan yayasan Mega Bintang atau LBH sangat membantu apalagi dibagian penamanan masyarakat. Hal ini ia sampaikan kepada penulis, bahwa Bapak Mudrick sendiri pun juga ikut terjun ke pos-pos kampling dan senang berbagi kepada pihak keamanan. Selain keamanan, bapak Mudrick juga senang berbagi dengan tukang becak yang ada di sekitar kantor LBH Mega Bintang. Biasanya Mudrick membagikan uang kepada tukang becak selepas ia melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Al-Muttaqien.

5. Bapak Budi

Pak Budi merupakan salah satu masyarakat yang menerima bantuan gerobak sampah gratis dari yayasan Mega Bintang. Ia sendiri adalah tukang sampah yang berada di kelurahan Jayengan. Kala itu gerobak sampah miliknya hilang diambil orang ketika ia letakkan di lapangan Kartopuran. Ia mengaku senang dan merasa sangat terbantu dengan sumbangan gerobak sampah tersebut. Berkat bantuan dari yayasan Mega Bintang, beliau masih bisa meneruskan pekerjaannya tersebut. Hingga saat ini gerobak sampah yang diberikan oleh yayasan Mega Bintang masih ia rawat dan dalam keadaan layak dipakai.

6. Bapak Sutiman

Beliau merupakan salah satu masyarakat yang beruntung yang mendapatkan sumbangan becak dan STNK gratis dari yayasan Mega Bintang. Ketika ditemui penulis, Bapak Sutiman ini sedang memarkirkan becaknya tidak jauh dari kantor LBH milik Mega Bintang. Beliau bercerita bahwa dengan bantuan becak dan STNK gratis sangat membantu ia untuk mendapatkan uang setiap harinya. Selain mendapatkan bantuan becak dan STNK gratis, biasanya Bapak Sutiman juga mendapatkan bantuan beras ketika ada pembagian beras dari yayasan Mega Bintang.

7. Bapak Wibowo

Bapak Wibowo selaku ketua RT 09 di kelurahan Serengan menyampaikan bahwa yayasan Mega Bintang ini tidak hanya membantu masyarakat di sekitar kantor yayasan, namun juga yang ada di wilayah lainnya. Seperti

halnya yang ada di kelurahan Serengan ini, yayasan Mega Bintang memberikan sumbangan yang berupa MCK untuk wilayah tersebut. Dikarenakan pada masa itu tidak setiap rumah mempunyai MCK yang layak untuk digunakan. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya MCK tersebut oleh masyarakat dengan baik, dan masih dirawat dan digunakan hingga saat ini.

Yayasan Mega Bintang masih bertumpu dengan slogannya yakni “Bolone Wong Cilik”. Yang pada awalnya Mega Bintang fokus dengan permasalahan politik kemudian berubah menjadi yayasan sosial dengan fokus mengedepankan kepentingan dan keadilan masyarakat kecil yang dinilai tidak mendapatkan keadilan. Mudrick selaku pembina dan pendiri yayasan Mega Bintang mampu membuktikan tekad dan ambisinya melalui yayasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Gerakan Mega Bintang bukanlah hanya issue semata. Ia memang pernah ada dan sempat membuat repot para penguasa baru. Gerakan Mega Bintang ini jauh dari gerakan aslinya pada tahun 1997. Karena pada kala itu aliansi tersebut bertujuan untuk melawan hegemoni Soeharto dan Golkar, alih alih untuk mendukung rezim pertahanan.

Respon pemerintah Orde Baru sendiri terhadap Aliansi Mega Bintang, pemerintah sempat melarang adanya simbol-simbol dan spanduk-spanduk Mega Bintang. Pemerintah juga melarang adanya spanduk Mega Bintang dalam pemilu PPP. Pencantuman Mega Bintang dianggap menyalahi peraturan tentang kampanye pemilu. Berakhirnya rezim Soeharto tidak menjadikan Mega Bintang menjadi berakhir.

Mega Bintang ini justru mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan miskin, tujuan pendirian yayasan ini semata mata hanya untuk membela masyarakat yang tidak mampu agar setara dengan yang lain. Banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan Mega Bintang ini seperti:

1. Membangun 41 MCK yang tersebar di Solo, Sragen, Wonogiri dan Sukoharjo

2. Pemberian bantuan buku dan alat tulis untuk anak-anak TPA dan Sekolah Dasar
3. Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum yang berkegiatan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang tidak mendapat keadilan
4. Membangun dan memelihara pos-pos polisi sebanyak 11 pos yang tersebar di Solo mulai dari Jalan Slamet Riyadi depan Solo Square ke timur hingga perempatan Nonongan
5. Membangun dan merawat sumber air yang dilakukan yayasan Mega Bintang di wilayah Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri
6. Memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar yayasan Mega Bintang
7. Pemberian bantuan STNK dan becak gratis sebanyak 100 buah yang dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon, Serengan dan beberapa di Kecamatan Laweyan
8. Pemberian bantuan gerobak sampah yang ditujukan kepada masyarakat sekitar yayasan Mega Bintang
9. Pemberian bantuan beras yang dilakukan rutin setiap bulan untuk masyarakat kelurahan Jayengan dan sekitarnya
10. Pemberian bantuan sembako dan relawan untuk korban Gempa Bumi di Yogyakarta dan banjir di Solo.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan serta literasi bagi para pembaca dan masyarakat umum, dan juga untuk memberikan informasi bahwa adanya yayasan Mega Bintang yang memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat umum yang merasa tidak mendapat keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Agn. (2004). "PRD Minta Ungkap Kasus PRD". *Koran Kompas*. Terbit tanggal 19 Juli 2004.

Asa, dkk. (1998). "Amien Rais: Kerusuhan Jakarta dan Solo Ada Dalangnya". *Koran Kompas*. Terbit 11 Juni 1998.

Azhar, I.S. (1997). "Aliansi Mega-Bintang, Perolehan Suara OPP, dan Kekerasan Politik". *Koran Kompas*. Terbit 28 Mei 1997.

JL. (1997). "PDI Pro-Mega Tak Akan Ikut Kampanye". *Koran Kompas*. Terbit 24 April 1997.

Kompas. (1997). "PPP di Ibu Kota, Luar Biasa Makin Tampak, Fenomena "Mega-Bintang"". *Koran Kompas*. Terbit 12 Mei 1997

Kompas. (1997). "Soal Pelarangan "Mega Bintang" dan Dokumen "Operasi Fajar": Kecemburuan pada PPP". *Koran Kompas*. Terbit tanggal 14 Mei 1997

Kompas. (2020). "Pasca-27 Juli 1996: Fenomena Mega Bintang dan Megawati yang Memilih Golput". *Kompas.com*. Terbit tanggal 29 Juli 2020.

Mohammad Thoyibi. 1999. "*Menentang Arogansi Kekuasaan Kasus Mega Bintang*", Muhammad University Press

M. Ryaas Rasyid. "*Analisis Kerusuhan Kampanye*". *Kompas* terbit tanggal 5 Juni 1997

TOV/ASA. (1997). "PPP Solo Realisasikan Kegiatan Mega Bintang". *Koran Kompas*. Terbit tanggal 3 Oktober 1997.

Buku

Emalia, I. (2006). *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press.

Ichsan Malik. 2004. "*Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*". Jakarta: Buku Kompas

Gaffa, A. (2002). "Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Meuthia-Ganie-Rochman dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed). 2002. "*Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*". Jakarta: LP3ES

Setiyono, B. (2013). "Pengawasan Pemilu oleh LSM". Yogyakarta: Media Presindo

Thoyibi, M. (1999). "Menentang Arogansi Kekuasaan Kasus Mega Bintang". UMS: Muhammadiyah University Press

Wasino & Endah Sri Hartatik. (2018). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penelitian*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Winarti, M. "Metodologi Penelitian Sejarah". *PPT FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia*.

Jurnal/ Skripsi

Angga, V.V. (2015). "Aktivitas Politik Partai Rakyat Demokratik Melalui Gerakan Mega Bintang Rakyat di Jakarta Tahun 1997". *Skripsi Ilmu Sejarah Universitas SebelasMaret*

Cholisin. (1998). "Dinamika LSM di Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Demokrasi". *Jurnal Informasi*. Vol. 26 No.1

Hardiansah, A.G (2016). "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia". *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 1 No.1

Gerald, G. (2019). "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Jurnal Politicon*. Vol. 1 No. 2.

Huda, T.F. (2012). "Dinamika Partai Persatuan Pembangunan Pada Era Orde Baru". *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember*.

"Kampanye Digelar Nyawa pun Berguguran", 1997, *Forum Keadilan* 6 (5)

- Mustafa, H. (2011). “Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarno Putri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”. *Skripsi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Nisa, N.I. dkk. (2017). “Strategy of Golongan Karyato be Winner in Election Year 1971-1977. *Jurnal Historya*. Vol. 1 No. 1.
- Pelor, S. dkk. (2018). “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.3 No.1
- Rochmawati, Y.B. (2011). “Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2004”. *Skripsi Universitas Sebelas Maret*.
- Rusidi, Z.N. (2007). “Kondisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1987-2004”. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.
- Sulaeman, A. (2015). “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Cosmogov*, Vol. 1 No. 1.
- Tajri, U. (2016). “Pergulatan PDI Perjuangan sebagai Partai Ideologis di Indonesia (Studi Diskriptif Kualitatif Tentang Pergulatan PDI Perjuangan dari Pragmatiske 1 Juni)”. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta*.
- Triyono, L. (1997). “ *Paradoks Demokrasi di Indonesia : Kerusuhan Pada Masa Kampanye Pemilu 1997*”. *JSP* Vol. 1, No. 2

Website

Ali. 2022. “25 Tahun Mega Bintang, Tetap Konsisten Membela dan Memperjuangkan Kepentingan Wong Cilik”. Joglosemar, dalam <https://joglosemarnews.com/2022/06/25-tahun-mega-bintang-tetap-konsisten-membela-dan-memperjuangkan-kepentingan-wong-cilik/>, diakses pada Minggu 04 Desember 2022 pukul 20.05 WIB

Arifin, M.S. (2009). “Faktor Megawati”, *Liputan6*. Dipublikasikan tanggal 28 Januari 2009. Diakses tanggal 15 April 2021.

Fadillah, R. (2019). Ini Penyebab Cuma Boleh Ada 3 Partai Politik di Era Soeharto. *Merdeka.com*. Dipublikasikan pada 15 Oktober 2019. Diakses pada 28 April 2021. Tersedia: <https://m.merdeka.com/politik/penyebab-cuma-boleh-ada-3-partai-politik-di-era-soeharto.html?page=2>.

Fadrik Aziz Firdausi, “ Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang orde Baru”, dalam <https://tirto.id/aliansi-mega-bintang-1997-menggoyang-orde-baru>, diakses pada Rabu 09 November 2022 pukul 20.51 WIB

Firdausi, F.A. (2019). Aliansi Mega Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru. *Tirto.id*. Dipublikasikan pada 3 Februari 2019, Diakses pada 12 April 2021.

Mediasiber. 2020. “Skandal Dibalik Mudrick Sangidu, pentolan Ormas Mega Bintang”. Dalam <https://www.mediasiber.com/utama/skandal-dibalik-mudrick-sangidu-pentolan-ormas-mega-bintang>

Primastya, M. (2019). Sejarah PDI Perjuangan, Didirikan Oleh IR Soekarno Tahun 1927 dengan Nama Awal PNI. *Tribunnews.com*. Dipublikasikan tanggal 7 Agustus 2019. Diakses tanggal 12 April 2021.

Putri, B.U. (2017). Kisah PDI: Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP. *Tempo.co*. Terbit tanggal 10 April 2017. Diakses tanggal 12 April 2021.

Soloskoy.com. 2021. “LBH Mega Bintang Siap Bantu Warga Jika Terjadi Pelanggaran Asas Keadilan-Kemanusiaan Saat PPKM Darurat”. Dalam <https://www.soloskoy.com/2021/07/mega-bintang-siap-bantu-warga-jika.html?m=1> , diakses pada 04 Desember 2022 pukul 20.35 WIB

Lampiran-Lampiran







NOTARIS & PPAT
ERET HARTANTO, S.H.
KOTA SURAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-978.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 5 Agustus 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 3-X.A-2005 Tanggal 11 Februari 2005



SALINAN AKTA

Tanggal : 22 Februari 2014

Nomor : 19

Akta : * AKTA PENDIRIAN *

* YAYASAN NUSA BINTANG SOLO INDONESIA 1997 *

Kantor

Jalan Ronggowarsito 55 Solo

Telp. (0271) 663959, 9138118, 5864618, Fax. (0271) 655618